



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PASTI LEBIH BAIK

*Elevating Digital Treasury:
Driving the Transformation Forward*

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2024





Perjalanan panjang modernisasi perkeretaapian Indonesia bermula dari sistem transportasi konvensional yang sederhana, perlahan berkembang melalui pembaruan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga hadirnya moda transportasi publik yang lebih modern, cepat, dan terintegrasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Dilatarbelakangi dari kesamaan semangat untuk terus melakukan perubahan guna memberikan pelayanan terbaik, tema **Modernisasi Perkeretaapian Nasional** dipilih sebagai inspirasi desain visual Buku Tahunan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024. Dengan mengusung nilai transformasi digital dan inovasi berkelanjutan, DJPb berkomitmen untuk menghadirkan tata kelola perbendaharaan negara yang adaptif, modern, dan terpercaya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	6
Kata Sambutan	8
Visi dan Misi DJPb	10
 Kerangka Kebijakan dan Implementasi Transformasi DJPb Tahun 2020 –2024	
Kerangka Kebijakan Transformasi	14
Inisiatif Strategis dan <i>Quickwins</i> 2020-2024	22
 Inisiatif Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
Gambaran Umum IS	28
IS Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara	32
IS Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara	36
IS DA Pengembangan <i>Simulation System</i> Realisasi APBN berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	41

Quickwins Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Gambaran Umum <i>Quickwins</i>	46
<i>Quickwins</i> Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan	48
<i>Quickwins</i> Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja	72
<i>Quickwins</i> Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja dan Keuangan <i>Generalized</i>	81
<i>Quickwins</i> Pengembangan <i>Anomaly Detection</i> dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah	86

Kegiatan Transformasi Kelembagaan

Pembinaan Duta Transformasi	96
Peningkatan SDM	101
Komunikasi	104
Monitoring dan Evaluasi	110

Daftar Akronim	114
-----------------------	-----

Tim Penyusun	117
---------------------	-----

KATA PENGANTAR



Pelaksanaan program transformasi kelembagaan tahun 2024 mencerminkan tekad DJPb untuk terus mendorong transformasi digital melalui penerapan teknologi modern, integrasi sistem, dan inovasi berkelanjutan yang memperkuat efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sulaimansyah

Direktur Sistem Perbendaharaan
selaku Ketua PMO DJPb

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perubahan bukan hanya fenomena sesaat, melainkan keniscayaan yang menuntut setiap organisasi untuk terus menyesuaikan diri. Dalam era digital, *treasury* harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi secara global. Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), kesadaran akan urgensi beradaptasi ini merupakan bentuk komitmen organisasi terhadap transformasi berkelanjutan.

Peran *treasury* kini tidak lagi terbatas pada aktivitas administratif, melainkan telah berkembang menjadi elemen strategis yang berperan dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan keuangan yang proaktif, serta menjadi navigator dalam menghadapi dinamika perubahan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran *Project Management Office* (PMO) DJPb untuk mendukung dan memudahkan proses transformasi.

PMO DJPb memiliki fungsi strategis dalam memastikan program-program Inisiatif Kementerian Keuangan dan program Transformasi Kelembagaan dalam organisasi berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Pada tahun 2024, DJPb sebagai *Initiative Owner* telah berhasil merealisasikan tiga Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dan empat *Quickwins* DJPb, sesuai dengan *milestones* dan *output* yang ditetapkan. Seluruh program transformasi tersebut bisa berhasil terwujud melalui harmoni antara PMO DJPb dengan seluruh *Initiative Owner*, *Unit in Charge*, para Duta Transformasi, dan seluruh insan perbendaharaan yang turut mendukung seluruh langkah transformasi DJPb.

Di sisi lain, DJPb tetap menjaga nilai-nilai organisasi yang menjadi fondasi budaya kerja, agar setiap langkah transformasi tetap terarah pada tujuan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Langkah ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara adaptif sehingga setiap inovasi yang diimplementasikan tetap selaras dengan identitas dan komitmen DJPb sebagai pengelola keuangan negara yang kredibel dan responsif.

Buku Tahunan Transformasi Kelembagaan Tahun 2024 disusun untuk dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian dan arah strategis transformasi organisasi selama tahun berjalan. Buku ini tidak hanya menjadi jejak naratif dari setiap inisiatif yang telah dijalankan, tetapi juga menjadi sarana reflektif untuk memperkuat komitmen seluruh insan Perbendaharaan dalam mewujudkan transformasi kelembagaan yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi hasil.

Dikemas dalam tema “*Elevating Digital Treasury: Driving the Transformation Forward*” mencerminkan tekad DJPb untuk terus mendorong transformasi digital melalui penerapan teknologi modern, integrasi sistem, dan inovasi berkelanjutan yang memperkuat efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen DJPb dalam membangun organisasi yang adaptif, dan berorientasi pada layanan publik sehingga mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif di era digital.

Salam Transformasi!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KATA SAMBUTAN



DJPb berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya sebagai pengelola keuangan negara yang andal dan terpercaya, yang tidak hanya memastikan efektivitas penyaluran anggaran, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kemajuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Astera Primanto Bhakti

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berbicara mengenai alokasi angka, tapi juga mencerminkan bagaimana pemerintah memprioritaskan kebijakan dan merespons dinamika internal dan eksternal. Keberhasilan APBN sebagai fondasi pembangunan ekonomi tidak lepas dari upaya transformasi kelembagaan. Transformasi kelembagaan dalam organisasi merupakan faktor kunci yang mengokohkan peran APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Organisasi yang bertransformasi cenderung lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik. Dalam konteks pengelolaan APBN, transformasi ini adalah fondasi untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Transformasi kelembagaan bukan hanya soal perubahan struktur, tetapi perubahan cara berpikir, bekerja, dan melayani publik. Saat ini transformasi kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah sampai pada tahap transformasi digital, yang merupakan langkah strategis untuk menciptakan organisasi yang lebih cepat, tanggap, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Transformasi digital ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan cara berpikir dan bekerja secara menyeluruh.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan tiga program utama dalam rangka transformasi digital dan pelaksanaan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. *Pertama*, pelaksanaan *upgrade* sistem Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan negara. Peningkatan ini memberikan manfaat dalam penguatan pengelolaan risiko operasional, penyempurnaan proses bisnis, serta peningkatan kemampuan sistem dalam merespons dinamika kebutuhan proses bisnis.

Kedua, perluasan pembayaran *common expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah ke seluruh Kementerian/Lembaga telah meningkatkan efisiensi

proses kerja satuan kerja. Dengan mekanisme ini, satuan kerja hanya menunggu tagihan diterima di SAKTI tanpa perlu melakukan pencetakan dokumen administrasi, sehingga memberikan penghematan biaya dan waktu, sekaligus mendorong penerapan prinsip *green economy* melalui pengurangan penggunaan kertas.

Ketiga, integrasi layanan pembayaran pensiun pertama termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) melalui aplikasi Gaji dengan aplikasi Taspen *One Hour Online Service* (TOOS) memberikan peningkatan layanan yang signifikan. Integrasi tersebut mempercepat penyampaian dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dan pembayaran hak peserta serta memastikan layanan yang terdigitalisasi, efisien, dan tepat waktu.

Seluruh capaian program transformasi kelembagaan dan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, dapat terealisasi berkat sinergi yang kuat antar unit lingkup DJPb dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, sehingga mampu menjawab tantangan perubahan dan meningkatkan kinerja DJPb untuk melakukan pengelolaan perbendaharaan negara secara berkelanjutan.

Melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan tata kelola, serta inovasi dalam setiap proses bisnis, DJPb berkomitmen untuk terus memperkuat peran strategisnya sebagai pengelola keuangan negara yang andal dan terpercaya, yang tidak hanya memastikan efektivitas penyaluran anggaran, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kemajuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Di tengah arus perubahan yang semakin cepat dan kompleks, mari kita jadikan transformasi kelembagaan bukan hanya sebagai simbolik, tetapi sebagai wujud tekad bersama. Dengan semangat kolaborasi, integritas, dan pembaruan berkelanjutan, kita wujudkan perbendaharaan negara yang modern, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Salam transformasi!

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

VISI DAN MISI DJPb

VISI

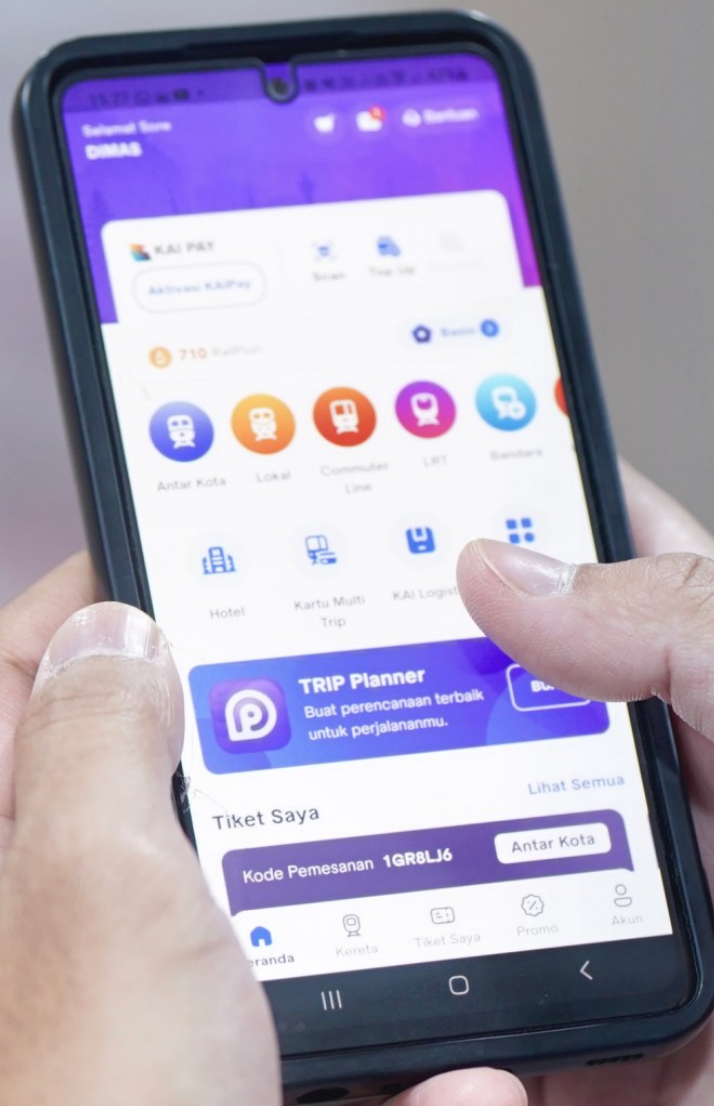
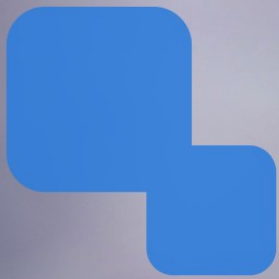
Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan"



MISI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3, yaitu memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif, serta nomor 4, yaitu mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.



01

Access Anytime, Anywhere

Pemanfaatan teknologi digital telah mengubah wajah layanan perkeretaapian. Pemesanan tiket kini semakin mudah, cukup melalui aplikasi yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, tanpa perlu mengantre panjang.

Transformasi serupa hadir dalam pengelolaan keuangan negara melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dengan SAKTI, satuan kerja dapat mengelola seluruh tahapan keuangan secara digital, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, SAKTI menghadirkan layanan perbendaharaan yang lebih mudah, efisien, dan akuntabel.



KERANGKA KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DJPb TAHUN 2020–2024

Perjalanan transformasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada periode 2019–2024 merupakan upaya strategis dalam mendukung pembangunan nasional, salah satunya dilakukan dengan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih modern, efisien, dan akuntabel. Perjalanan transformasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berpijak pada kerangka kebijakan yang saling terkait, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2020–2024, hingga Rencana Strategis (Renstra) DJPb 2020–2024. Ketiga kerangka ini menjadi fondasi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi Indonesia Maju 2045.

Dalam kerangka tersebut, DJPb menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam Inisiatif Strategis (IS) dan *Quickwins*. IS berfungsi sebagai panduan jangka menengah yang memetakan transformasi secara menyeluruh, sedangkan *Quickwins* menjadi langkah taktis yang memberikan hasil cepat dan nyata. Sinergi keduanya memastikan bahwa perubahan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Pencapaian IS dan *Quickwins* periode tahun 2024 mencerminkan konsistensi DJPb dalam mengelola sumber daya, menyederhanakan proses bisnis, memanfaatkan teknologi digital, dan memperkuat tata kelola keuangan negara. Lebih dari sekadar pencapaian target, transformasi ini menunjukkan adaptabilitas DJPb dalam merespons tantangan global dan kebutuhan *stakeholder*.

Pada Bab ini akan diuraikan keterkaitan antara arah kebijakan nasional, Renstra, IS, dan *Quickwins*, serta bagaimana keterpaduan tersebut menjadi penggerak utama dalam perjalanan transformasi DJPb. Dengan landasan yang kokoh dan orientasi yang jelas, DJPb menatap masa depan dengan komitmen untuk terus menghadirkan layanan perbendaharaan negara yang unggul, modern, dan akuntabel.



KERANGKA KEBIJAKAN TRANSFORMASI

Transformasi yang dilaksanakan DJPb tidak terlepas dari kerangka kebijakan yang telah ditetapkan secara nasional dan kelembagaan. Untuk memastikan bahwa setiap langkah perubahan memiliki arah yang jelas dan terukur, DJPb merujuk pada tiga dokumen utama: RPJMN 2020–2024, Renstra Kementerian Keuangan 2020–2024, dan Renstra DJPb 2020–2024. Ketiga dokumen tersebut membentuk fondasi strategis yang saling terkait dan menjadi acuan dalam pelaksanaan Inisiatif Strategis dan *Quickwins* DJPb.

1. RPJMN TAHUN 2020–2024

RPJMN Tahun 2020–2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjabarkan visi, misi, dan program Presiden periode pemerintahan tahun 2020–2024. RPJMN 2020–2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Sebagai bagian dari perencanaan jangka menengah, RPJMN 2020–2024 juga menjadi titik tolak untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045, fokus utama diarahkan pada penguatan transformasi ekonomi. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama. Kelima arahan tersebut meliputi: 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia; 2) Pembangunan Infrastruktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; dan 5) Transformasi Ekonomi.

Visi, misi, dan arahan utama Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan**, meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



2. RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020–2024

Sebagai tindak lanjut dari RPJMN 2020-2024, Kementerian Keuangan menyusun Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Renstra ini disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain mengacu pada RPJMN, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga perumusan kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Melalui dokumen tersebut ditetapkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

A. VISI

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

B. MISI

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan dalam mendukung visi dan misi Presiden, ditetapkan **5 (lima) tujuan** Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, telah dirumuskan **10 (sepuluh) sasaran strategis** yang menjadi kondisi yang diharapkan untuk dicapai Kemenkeu selama tahun 2020-2024.



Adapun rincian tujuan beserta sasaran strategis Kemenkeu dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
01 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
02 Penerimaan negara yang optimal.	Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBPN yang optimal.
03 Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.	Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
04 Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.	a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial. c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
05 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	a. Organisasi dan SDM yang optimal. b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi. c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.



3. RENSTRA DJPB TAHUN 2020–2024

Sebagai tindak lanjut dari Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, DJPb menyusun Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2020–2024, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan di lingkungan DJPb. Dokumen ini juga menunjukkan peran DJPb dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu tahun 2020-2024. Renstra DJPb 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra DJPb juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga perumusan kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra DJPb diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan khususnya di bidang perekonomian.

Renstra DJPb Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 193/PB/2020. Melalui dokumen tersebut ditetapkan visi, misi, serta tujuan dan sasaran strategis DJPb Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

A. VISI

Visi DJPb Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

B. MISI

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan **5 (lima) tujuan** DJPb Tahun 2020-2024. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, telah dirumuskan **9 (sembilan) sasaran strategis** yang menjadi kondisi yang diharapkan untuk dicapai DJPb selama tahun 2020-2024.



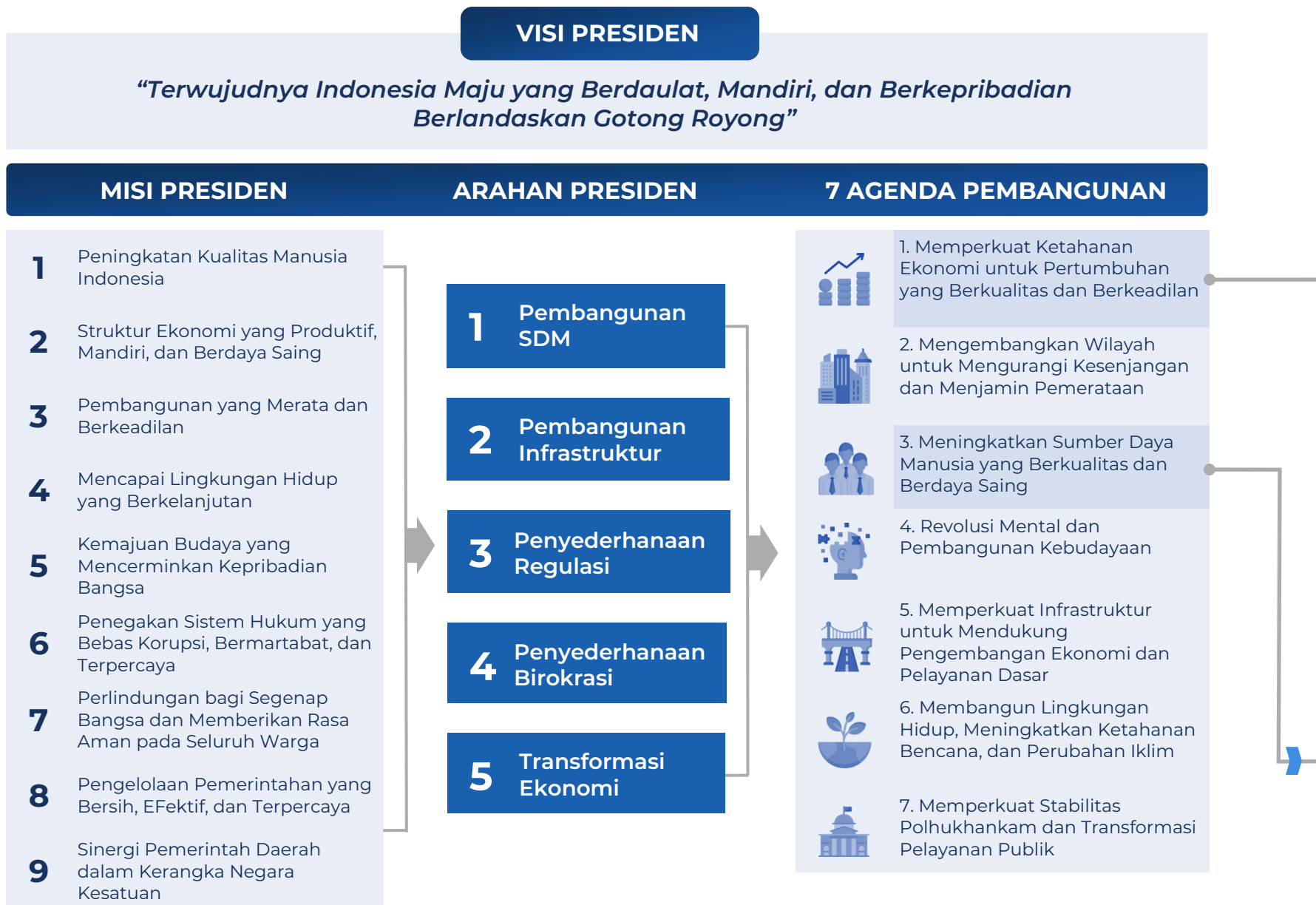
Adapun rincian tujuan beserta sasaran strategis DJPb dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
01 Pengelolaan kas negara yang <i>prudent</i> dan optimal.	Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal.
02 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel.	a. Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel. b. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.
03 Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern.	a. Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan berkelanjutan. b. Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat.
04 Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai <i>best practice</i> .	a. Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel. b. Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna.
05 Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal .	a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas. b. Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.



D. DUKUNGAN DJPB DALAM PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

Dari 7 Agenda Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan melalui pelaksanaan beberapa strategi. Dalam hal ini, DJPb khususnya mendukung **Agenda Pembangunan 1 dan 3**, sebagaimana ditunjukkan pada bagan berikut.







INISIATIF STRATEGIS DAN QUICKWINS

Dengan landasan kebijakan yang telah ditetapkan melalui RPJMN, Renstra Kementerian Keuangan, dan Renstra DJPb, program transformasi yang dilakukan DJPb memiliki pijakan yang kuat dan terstruktur. Dokumen tersebut tidak hanya menetapkan visi dan sasaran strategis, tetapi juga menjadi acuan dalam merancang langkah-langkah implementatif yang konkret. Dalam hal ini, DJPb mengimplementasikan IS dan *Quickwins* sebagai instrumen pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Kedua instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan transformasi DJPb berjalan secara efektif, adaptif, dan berdampak nyata, baik dalam jangka menengah maupun jangka pendek. IS sebagai arah strategis jangka menengah, dan *Quickwins* sebagai langkah-langkah taktis yang mempercepat pencapaian hasil. Bagian berikut akan menguraikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan IS dan *Quickwins* sebagai wujud nyata dari transformasi DJPb.

1. INISIATIF STRATEGIS TAHUN 2020-2024

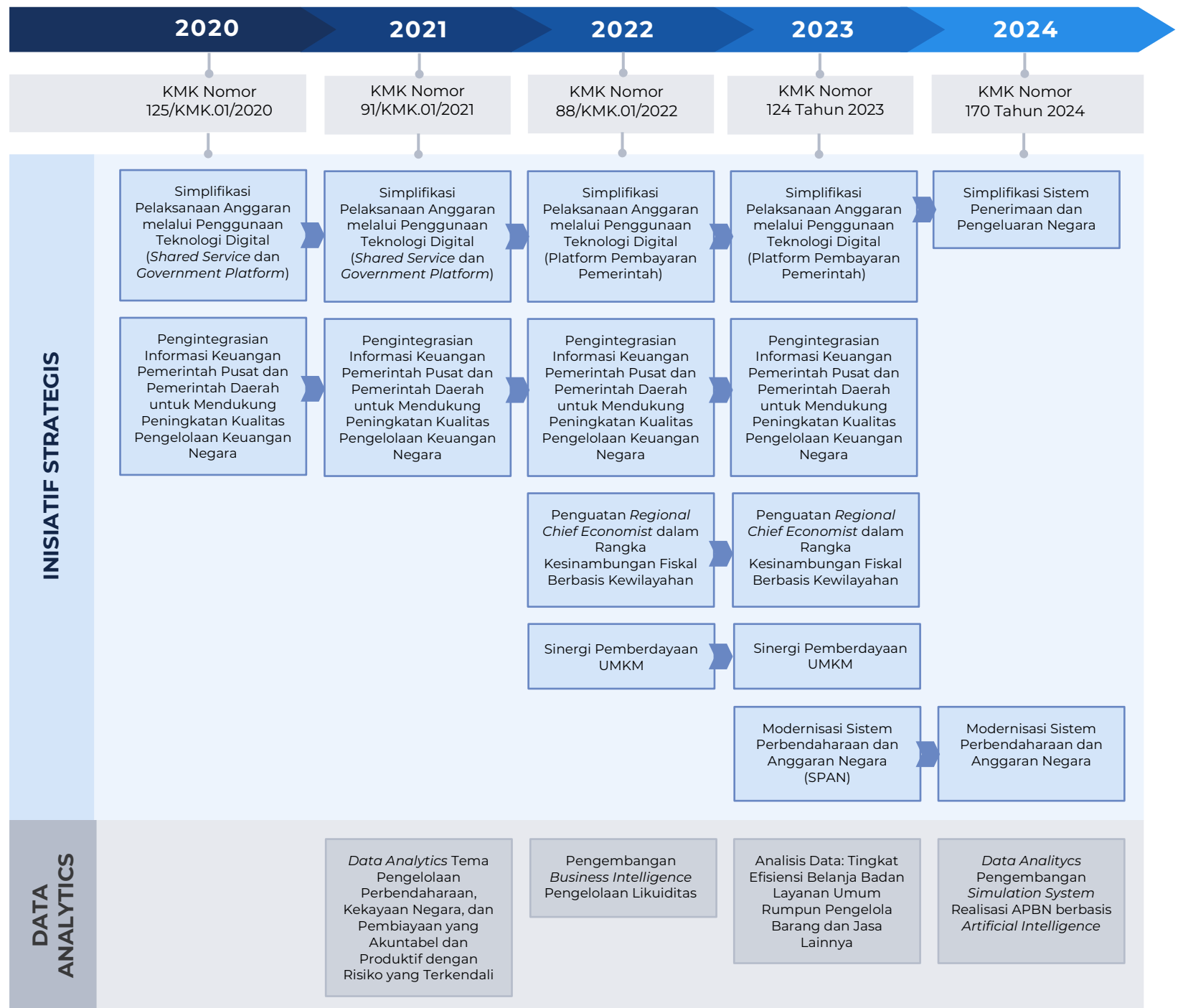
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kemenkeu merumuskan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yang saat ini disebut sebagai Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan (IS Kemenkeu). Penyusunan IS Kemenkeu mengacu pada Roadmap Reformasi Birokrasi, Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan, serta Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kemenkeu. IS Kemenkeu dapat bersifat

top-down sebagaimana arahan pimpinan maupun *bottom-up* yang merupakan hasil kajian, survei, atau aspirasi unit/pegawai. Cikal bakal IS dirumuskan melalui proses kolaboratif bersama unit eselon I di lingkungan Kemenkeu guna menghasilkan kebijakan transformasi yang selaras dengan arah prioritas pembangunan, kebutuhan organisasi, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Implementasi IS Kemenkeu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan, serta Keputusan Sekretaris Jenderal sebagai pengaturan lebih rinci terkait tata kelola implementasi IS. Melalui dokumen tersebut, ditetapkan berbagai IS yang dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu.

IS Kemenkeu dibagi ke dalam beberapa tema, antara lain: Tema Sentral; Tema Penerimaan; dan Tema Fiskal, Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko. Selain perumusan IS ke dalam berbagai tema, juga dirumuskan IS yang berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan *data analytics* sebagai bagian dari penguatan pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai unit eselon I di bawah Kemenkeu yang menjalankan fungsi perbendaharaan negara, DJPb turut berperan aktif dalam pelaksanaan IS Kemenkeu sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugasnya. Selama periode 2020-2024, DJPb telah melaksanakan berbagai IS yang dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut.





2. QUICKWINS TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta pencapaian Inisiatif Strategis Kemenkeu, DJPb merumuskan langkah strategis berupa inisiatif kegiatan yang dituangkan dalam *Quickwins*. Selama periode 2020-2024, *Quickwins* yang dilaksanakan DJPb dapat diuraikan sebagai berikut:

2020

1. Optimalisasi dan Pemanfaatan BMN secara Efektif dan Efisien.
2. Otomatisasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat Fase II.
3. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri.
4. Simplifikasi Pengelolaan Rekening Pemerintah.
5. *Piloting* Penggunaan UP melalui Sistem *Digital Payment Marketplace* pada Satker K/L.
6. Digitalisasi *Impact Analysis* Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) (*Endline*).
7. BLUSimpel: Integrasi dan Simplifikasi Tata Kelola BLU.
8. BLU *Integrated Online System 2.1*: Digitalisasi Pengelolaan BLU.
9. Kerangka Penguatan Konsolidasi Statistik Fiskal Nasional (GFS).
10. Modul Pelaporan-SIKRI.
11. Penyelesaian Rekomendasi Pengangkatan Pejabat Fungsional di Bidang Perbendaharaan pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. Simplikasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan Lingkup Ditjen Perbendaharaan Fase I.
13. Aplikasi Gaji Berbasis Web.

2021

1. Implementasi FRESH Office DJPb.
2. Digitalisasi Modul MP PNBP Tidak Terpusat.
3. Digitalisasi Sistem Pembayaran Pemerintah.
4. Digitalisasi Pembiayaan Umi.
5. *Go Live* Investasi Pemerintah (Tahap I).
6. BLU *Maturity Rating Assessment*.
7. BIOS *NextGen Maturity Rating* BLU.
8. Otomatisasi Telaah Laporan Keuangan.
9. *Electronic Bank Guarantee* (E-BG).
10. Rancangan *Treasury Big Data*.

2022

1. *Automatic Business Intelligence Dashboard* (ABID).
2. Digitalisasi Bantuan Sosial melalui Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran dan Penggunaan Platform Digital.
3. Interoperabilitas Digipay pada Bank Umum.
4. Implementasi Investasi Pemerintah (Tahap II).
5. *Early Warning System*: Pengukuran Kemampuan Debitur (BUMN dan Pemda) untuk Membayar Pinjaman.
6. *Maturity Rating* Satker BLU.
7. Sinergi Pembinaan BLUD.
8. *Dashboard Flash Report* Transaksi BUN.
9. Simplifikasi Rekonsiliasi dengan MONSAKTI.
10. Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).
11. *Treasury Big Data*.
12. Elektronifikasi Transaksi SAKTI.



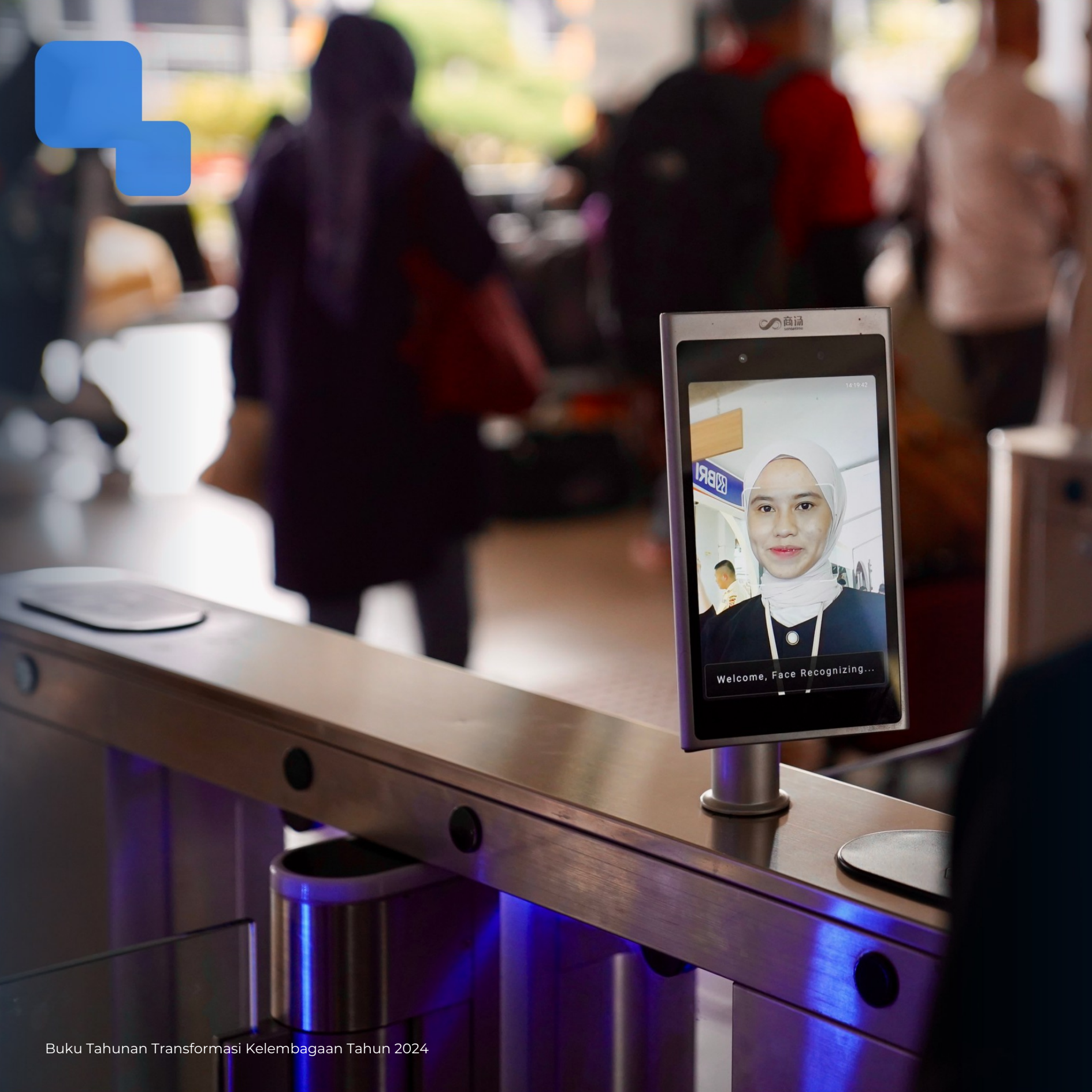
2023

1. *Dashboard ORGANISE (Organization and Governance Integrated System).*
2. Modul Proyeksi Capaian Output (on SAKTI).
3. *Dashboard Fiskal Regional.*
4. Implementasi *Government E-Wallet* dalam Transaksi Pemerintah.
5. *Early Warning System (EWS)* Pinjaman Debitur BUMN dan Pemda 2.0.
6. Implementasi Tata Kelola *New Architecture Design for Investment Administration (NADIA).*
7. Pengembangan BLU DMS (*Decision Making Support System*) - Data Layanan BLU.
8. Konsolidasi Pengelolaan Kas BLU.
9. Percepatan Asersi Laporan Keuangan K/L yang Handal dan Akuntabel.
10. Mekanisme Pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran.
11. Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan Jamkesmen (SIPRIMA).
12. Migrasi dan Utilisasi Gaji Web K/L.
13. Pengembangan OM SPAN untuk Mendukung Penyaluran Seluruh TKD melalui KPPN Mitra Pemerintah Daerah.

2024

1. Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan: Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*); Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date (SPD)* melalui Penerapan *Robotic Process Automation (RPA)*; SAKTI BLU; Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun.
2. Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan *Generalized*.
3. Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja.
4. Pengembangan *Anomaly Detection* dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah.

Transformasi kelembagaan bukanlah proses yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan yang saling terkait dan saling menguatkan. Pelaksanaan transformasi DJPb selama tahun 2020-2024 merupakan hasil dari perencanaan strategis yang berpijak pada RPJMN, Renstra Kementerian Keuangan, dan Renstra DJPb. Melalui IS dan *Quickwins*, DJPb telah menjalankan berbagai program yang tidak hanya meningkatkan kinerja internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Keterpaduan antara arah kebijakan nasional dan pelaksanaan program di tingkat unit kerja menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa transformasi berjalan secara konsisten dan berdampak. IS dan *Quickwins* DJPb menjadi bukti bahwa perubahan dapat dilakukan secara terstruktur, terukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan lingkungan strategis.



02

Simplifying the Process

Penggunaan teknologi *face recognition* pada layanan perkeretaapian menghadirkan pengalaman baru bagi penumpang. Verifikasi identitas kini dapat dilakukan lebih cepat dan akurat melalui pemindaian wajah, tanpa perlu menunjukkan tiket fisik. Selain mempercepat proses *boarding*, teknologi ini juga mendukung gerakan *go green* karena penumpang tidak lagi perlu mencetak *boarding pass*.

Semangat yang sama tercermin dalam transformasi perbendaharaan melalui implementasi SAKTI. Dokumen pencairan dana APBN kini dapat disampaikan secara digital, dilengkapi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi, tidak lagi memerlukan berkas fisik yang disampaikan ke KPPN. Inisiatif ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga meneguhkan komitmen menuju sistem keuangan negara yang modern, transparan, dan *paperless*.



INISIATIF STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

GAMBARAN UMUM

Sebagai salah satu organisasi krusial di Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memegang peranan penting dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui kebijakan, instrumen, kinerja, dan pengaruhnya yang kuat. Dinamika lingkungan eksternal yang kian kompleks dan cepat mendorong pemerintah untuk merancang ulang institusi agar lebih tangkas dan adaptif. Transformasi masif di Kemenkeu merupakan hal yang sangat penting, mengingat peran fiskal sebagai penggerak utama transformasi ekonomi dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Untuk menghadapi tantangan ini dan bergerak menuju *Future Government*, diperlukan konsep *Government of One* yang mampu mengolaborasikan, mengintegrasikan, dan menyinergikan layanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Transformasi ini juga didorong oleh pergeseran *driver* dan struktur perekonomian, peningkatan penggunaan dan integrasi teknologi, dinamika geopolitik, perubahan struktur demografi, peningkatan harapan publik, kebutuhan respons cepat dari pemerintah, serta peran aktif pemerintah dalam isu perubahan iklim dan ekonomi inklusif.

Sejalan dengan tantangan internal dan eksternal tersebut, Kemenkeu menetapkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Selanjutnya, visi dan misi Kemenkeu diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai Inisiatif Strategis (IS). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2024 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, telah ditetapkan 28 (dua puluh delapan) IS Kemenkeu yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tema serta IS Data Analitik dengan rincian sebagai berikut:



Gambar: Peta Inisiatif Strategis Kemenkeu Tahun 2024



Inisiatif Strategis Tema Sentral

Terdiri dari 6 (enam) IS sebagai berikut:

1. Penguatan Budaya Kemenkeu (*New Ways of Working*)
2. *Financial Reporting Single Window* (FRSW)
3. Penguatan Peran Profesi Keuangan (*Intermediaries*)
4. Penguatan Integritas melalui Penguatan Model Tiga Lini Terintegrasi
5. Perwujudan Pola Pengembangan SDM yang Terstruktur dan Efektif berbasis Peran melalui *Learning Path* bagi Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara
6. Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak

Inisiatif Strategis Tema Penerimaan

Terdiri dari 5 (lima) IS sebagai berikut:

1. *Joint Program* Sinergi Reformasi Optimalisasi Penerimaan
2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
3. Harmonisasi Sistem Kementerian Keuangan Terdampak Implementasi NPWP 16 Digit dan Penghapusan NPWP Cabang
4. Peta Jalan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Jangka Menengah
5. Transformasi *Core Customs*

Inisiatif Strategis Data Analitik

Terdiri dari 11 (sebelas) IS sebagai berikut:

1. Peningkatan Keandalan *Machine Learning* dan *Artificial Intelligence* Kemenkeu dalam Pengelolaan Keuangan Negara melalui Audit Algoritma
2. *Data Analytics* Profil Risiko Satker
3. Penerapan AI pada *Platform Knowledge Management System* Kementerian Keuangan
4. Penyusunan Alat Bantu Penilaian Pemanfaatan BMN
5. Implementasi Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan *Artificial Intelligence*
6. Pengukuran Dampak Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) pada Perekonomian Indonesia
7. *Data Analytics* Kajian manfaat ekonomi dan sosial atas pendanaan lahan PSN dan pembangunan PSN
8. *Data Analytics* Kinerja Ekonomi Sektoral (Lanjutan)
9. Simulasi Dampak Perubahan Tarif Pajak dan Kepabeanaan Terhadap Kinerja Ekonomi dan APBN
10. Pengembangan *Customer Risk Management* Dalam Proses Bisnis Lelang
11. Pengembangan *Simulation System* Realisasi APBN berbasis *Artificial Intelligence*.



Inisiatif Strategis Tema Belanja, Fiskal, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Terdiri dari 6 (enam) IS sebagai berikut:

1. *Joint Program* Tema Belanja, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
2. Penguatan Implementasi Integrasi sistem Perencanaan penganggaran
3. Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara
4. Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara
5. Penyempurnaan Pengelolaan Aset Negara
6. Modernisasi Pelayanan Lelang Melalui Digitalisasi Proses Bisnis

Dengan diimplementasikannya berbagai Inisiatif Strategis ini, Kemenkeu berharap dapat mencapai *strategic outcome* berupa "Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan", demi mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik serta Indonesia yang adil dan makmur.

Kemenkeu memegang peranan strategis dalam pengelolaan belanja negara. Sebagai unit eselon I dibawah Kemenkeu, DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan tugas tersebut, DJPb bersama dengan organisasi eselon I lainnya turut berperan aktif dalam pelaksanaan IS Kemenkeu, baik sebagai penanggung jawab utama maupun pendukung. Adapun IS yang menjadi tanggung jawab DJPb pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara; dan
- c. *Data Analytics* Pengembangan *Simulation System* Realisasi APBN berbasis *Artificial Intelligence*.



IS MODERNISASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

UIC Utama: Direktorat SITP

LATAR BELAKANG

Reformasi keuangan negara telah menjadi perhatian dan upaya konsisten dari pemerintah yang dimulai dengan ditetapkannya paket undang-undang bidang keuangan negara. Sebagai perwujudan reformasi ini, pada tahun 2009 dikembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), sebuah sistem informasi keuangan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. SPAN menggunakan aplikasi berbasis COTS yaitu Oracle Financial, dengan mengacu pada *Single Entry Point* dan *Single Database*. Tujuan utama implementasi SPAN adalah untuk mendukung transparansi dan profesionalisme dalam manajemen keuangan negara serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

SPAN mengintegrasikan berbagai proses bisnis yang digolongkan menjadi tiga kategori dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan Anggaran, yang terdiri dari Modul Penganggaran (*Budget Preparation*).
- Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari: Manajemen DIPA (*Management of Spending Authority Module*); Manajemen Komitmen (*Commitment Management Module*); Manajemen Pembayaran (*Payment Management Module*); Manajemen Penerimaan (*Government Receipt Module*); dan Manajemen Kas (*Cash Management Module*).
- Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari *General Ledger and Reporting Module* dan *Standard Chart of Accounts*.

Sejak diimplementasikan pada tahun 2014 dan *Go-Live* pada akhir tahun 2015, SPAN telah memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Capaian penting yang didukung oleh implementasi SPAN meliputi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun 2017 hingga 2022, peningkatan manajemen pengelolaan keuangan negara melalui integrasi *data supplier*, kontrak, dan pagu anggaran secara *real time*, serta efisiensi dalam proses pembayaran melalui SP2D elektronik, interkoneksi perbankan, dan rekonsiliasi rekening yang terotomasi.

SPAN digunakan oleh lebih dari 2.400 pengguna dan memproses transaksi dalam jumlah masif dengan struktur data berdasarkan Bagan Akun Standar. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 nilai transaksi mencapai Rp3.106,4 triliun, meliputi pagu penerimaan sebesar Rp2.266,2 triliun dan pagu pembiayaan sebesar Rp840,2 triliun, dengan tren yang terus meningkat setiap tahun.

Saat ini SPAN menggunakan *Commercial Off-The-Shelf* (COTS) dari Oracle E-Business Suite (EBS) versi 12.1.3 dengan Database Oracle versi 11.2. Namun, *principal support* untuk EBS versi 12.1.3 telah berakhir sejak Desember 2021 dan Database Oracle 11.2 telah mengalami *end support* sejak Desember 2020. Kondisi ini meningkatkan risiko operasional SPAN dan mengurangi kemanfaatannya karena tidak digunakannya *patch* versi terbaru.



Sejalan dengan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mulai mempertimbangkan upaya *upgrade version* Aplikasi SPAN. Ruang lingkup *upgrade* ini meliputi migrasi ke sistem baru melalui *upgrade system* dan *database* menuju target aplikasi EBS versi 12.2.12 dan Oracle Database 19c. Disamping itu, terdapat dua kondisi umum yang juga menjadi pertimbangan modernisasi SPAN melalui inisiatif SPAN *Upgrade Version*. Kondisi pertama adalah dinamika proses bisnis pengelolaan keuangan negara yang menuntut manajemen keuangan negara yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel. Kondisi kedua adalah perkembangan lingkungan operasi SPAN sejak SAKTI menyelesaikan *roll out full* modul pada tahun 2022 dan implementasi Modul Manajemen Penerimaan Negara Generasi Ketiga sejak tahun 2020. Kedua hal tersebut mendasari perlunya proyeksi perluasan kemanfaatan sistem melalui integrasi/interkoneksi.

Selain melakukan *upgrade* aplikasi dan *database* SPAN, telah dilakukan *assessment* pada perangkat *middleware* yang digunakan SPAN, yaitu Xico. *Middleware* ini adalah perangkat lunak yang menyediakan layanan komunikasi dan integrasi antar

aplikasi dan sistem yang berbeda. Dari *assessment* tersebut diperoleh hasil bahwa Xico sudah *obsolete* yang akan berdampak pada peningkatan *vulnerability* aplikasi. Berdasarkan hasil tersebut, dipertimbangkan melakukan *reengineering middleware* dari Xico ke *Service-Oriented Architecture* (SOA) agar dapat mendukung proyeksi perluasan kemanfaatan sistem melalui integrasi/interkoneksi dalam modernisasi SPAN.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan teknis dan tuntutan strategis sebagaimana uraian di atas, pelaksanaan *upgrade* sistem SPAN merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas sistem pengelolaan keuangan negara. Inisiatif tersebut selanjutnya dituangkan dalam Inisiatif Strategis Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara. Modernisasi ini tidak semata ditujukan untuk menjawab keterbatasan teknologi eksisting, tetapi juga memberikan manfaat langsung pada pengelolaan risiko operasional dan penyempurnaan proses bisnis, serta memberikan dampak maksimal dalam pemanfaatannya untuk merespon kebutuhan proses bisnis yang terus berkembang.



END STATE



KEADAAN SAAT INI (BEFORE)

Risiko operasional tinggi karena tidak didukung pemanfaatan teknologi terbaru dan *support* dari *principal* (EBS.12.1)

Fokus pada efisiensi pemrosesan transaksi dan akuntabilitas yang dicapai dengan atau melalui agregasi data dan konsolidasi laporan.

Fokus pada aktivitas penyempurnaan proses bisnis dan masih mengadopsi beberapa fitur dari pengembangan/sistem sebelumnya berbasis dokumen *hardcopy*.

Pengembangan terbatas pada proses bisnis lingkup perbendaharaan dan anggaran. Pengembangan yang terkait dengan unit eselon I lainnya lebih bersifat dalam perspektif alur data sebagai pengguna/user SPAN BA 99.

Interkoneksi dengan sistem pendukung diluar SPAN terbatas pada interkoneksi dengan sistem perbankan dalam rangka penerbitan dan pemrosesan SP2D.

KEADAAN SETELAH IS DILAKSANAKAN (AFTER/END STATE)



Manajemen risiko untuk operasional layanan lebih terjamin dengan penggunaan teknologi terbaru dan dukungan *principal* untuk periode waktu yang relevan (EBS.12.2)

Sistem dikembangkan sebagai bagian dari interkoneksi sistem yang mendukung digitalisasi dan modernisasi proses bisnis melalui integrasi data. Keunggulan tersebut diharapkan dapat mendukung analisis data yang lebih komprehensif.

Terdapat dukungan sistem untuk digitalisasi yang lebih memenuhi kualitas/*assurance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan *data validity* dan *system integration* yang memadai. Kondisi ini diharapkan didukung dari fitur terbaru atas teknologi yang digunakan sehingga dapat mengarah pada digitalisasi/*paperless*.

Pengembangan diharapkan dapat lebih mewujudkan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS), meliputi fungsi-fungsi diluar anggaran termasuk yang berkaitan dengan eselon I di lingkungan Kemenkeu untuk memungkinkan integrasi atau interkoneksi sistem/EBS.

Interkoneksi diharapkan dapat menyediakan *hub/portal/system* pendukung lainnya yang memungkinkan interkoneksi data dengan sistem perbankan dan non perbankan.



CAPAIAN

Penanggungjawab utama dalam pelaksanaan IS Modernisasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara adalah Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Adapun unit lain yang mendukung pelaksanaan IS tersebut antara lain Direktorat Jenderal Anggaran, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Sahli Bidang OBTI, Sahli Bidang Pengeluaran Negara, Sahli Bidang Penerimaan Negara, dan unit eselon II pada DJPb (Setditjen Perbendaharaan, Direktorat SP, Direktorat PA, Direktorat PKN).

Rencana kerja pelaksanaan IS telah dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-34/SJ/2024 Tentang Tata Kelola Implementasi Inisiatif Kementerian Keuangan yaitu dengan melaksanakan 3 (tiga) *key milestone*.

Pada tahun 2024, seluruh *milestone* telah selesai dilaksanakan dengan capaian *output* sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumentasi *User Acceptance Test* (UAT) implementasi sistem layanan perbendaharaan dan anggaran yang telah disempurnakan dari/oleh *stakeholder* terkait.
- b. Tersedianya dokumen persetujuan atas rancangan

penyempurnaan proses bisnis berbasis SPAN dengan versi *Enterprise Business Suite* (EBS)/ *software* pendukung lainnya yang terkini.

- c. Tersedianya dokumen persetujuan atas rancangan integrasi dan interkoneksi SPAN dengan sistem utama dan pendukung pengelolaan keuangan negara, di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.
- d. Tersedianya rancangan regulasi dan proses bisnis pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan.
- e. Tersedianya rancangan sistem informasi pengelolaan keuangan yang mengakomodasi pengelolaan perbendaharaan terintegrasi di Kementerian Keuangan.



IS SIMPLIFIKASI SISTEM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA

UIC Utama: Direktorat PA, Direktorat PKN, Direktorat SP, dan Direktorat SITP

LATAR BELAKANG

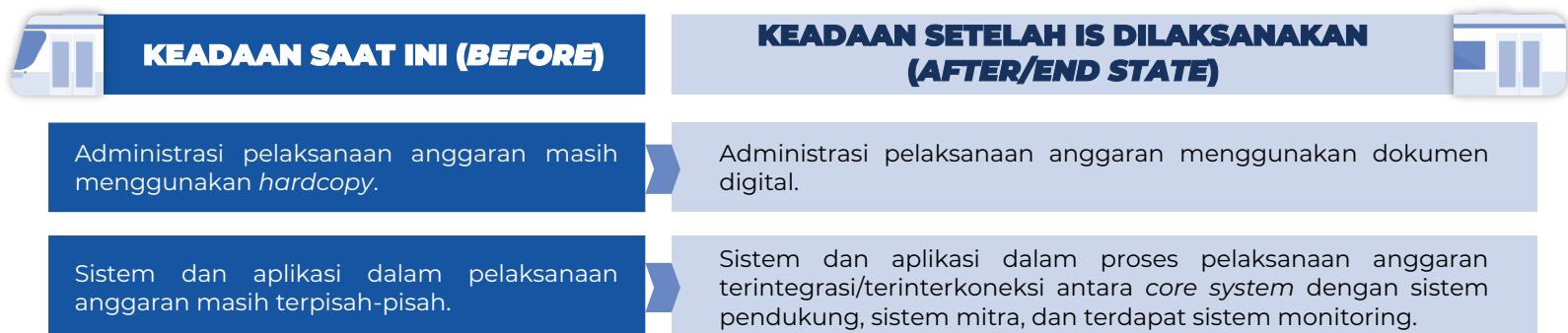
Saat ini, pelaksanaan administrasi anggaran negara masih dilakukan secara manual dengan menggunakan *hardcopy*, yang menghambat efisiensi dan ketepatan waktu. Sistem dan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran belum terintegrasi, masih terpisah-pisah antar unit, sehingga menyulitkan koordinasi dan *monitoring*. Setiap unit eselon I yang mengelola penerimaan negara menggunakan sistem *billing* masing-masing, meskipun telah terkoneksi ke Modul Penerimaan Negara (MPN), sehingga menimbulkan redundansi dan inefisiensi dalam pengelolaan serta pembiayaan sistem. Selain itu, BUN (Bendahara Umum Negara) belum menetapkan standar *payment gateway* untuk memastikan penerimaan negara disetor secara efisien, tepat waktu, dan tepat jumlah. Di sisi lain, kebutuhan untuk mengembangkan *payment gateway* guna memfasilitasi transaksi belanja

satker Kementerian/Lembaga (K/L) secara daring juga belum terpenuhi.

Menyadari urgensi ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai *initiative owner* IS Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan pemanfaatan teknologi digital, melalui 3 (tiga) *key milestones*, yaitu:

- Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran Melalui *Platform* Pembayaran Pemerintah
- Desain *Payment Gateway* Pemerintah
- Piloting* Implementasi *Single Billing* Transaksi Penerimaan Negara pada Modul Penerimaan Negara

END STATE





KEADAAN SAAT INI (BEFORE)

Masing-masing unit eselon I yang mengelola penerimaan negara memiliki sistem *billing* sendiri yang terkoneksi MPN.

BUN belum menetapkan standardisasi *payment gateway* untuk memastikan seluruh penerimaan negara disetorkan secara efisien, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Kebutuhan pengembangan *payment gateway* pemerintah untuk memfasilitasi transaksi belanja satker K/L secara *online*.

KEADAAN SETELAH IS DILAKSANAKAN (AFTER/END STATE)



Pengelolaan dan pengembangan sistem penerimaan negara menjadi satu dalam satu sistem, baik Sistem *Billing* dan Sistem MPN, sehingga dapat mengefisiensikan operasional maupun biaya *maintenance*.

Adanya standar *payment gateway* pemerintah yang menjadi rujukan bagi seluruh entitas yang menjadi *stakeholder* dalam sistem pembayaran penerimaan negara.

Pemerintah bisa memfasilitasi penyediaan *payment gateway* untuk transaksi belanja satker K/L secara *online* melalui platform *marketplace* pemerintah.

CAPAIAN

Capaian signifikan IS Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara antara lain:

Terwujudnya pelaksanaan anggaran secara digital melalui Platform Pembayaran Pemerintah

Capaian kinerja dalam pengembangan layanan pembayaran melalui Platform Pembayaran Pemerintah oleh Tim Pengelola Platform pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tunjangan Kinerja , Uang Makan, dan Uang Lembur

- a. Hasil evaluasi *piloting* Fase 1 adalah sebagai berikut:
 1. Terdapat 30 permasalahan berdasarkan hasil *one on one meeting* dengan *stakeholder* terkait dan 5 rekomendasi berdasarkan hasil *quality assurance*

dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang dibahas di dalam kegiatan evaluasi.

2. Berdasarkan hasil pembahasan terdapat 2 permasalahan yang dinyatakan sudah selesai antara lain: sistem presensi Satu Kemenkeu saat ini sudah dapat membaca hari libur sehingga data potongan presensi pada hari libur pada saat dilakukan rekapitulasi kehadiran sudah tidak muncul dan pengiriman data SK dari e-Tukin/HRIS ke gaji web sudah tidak dilakukan secara manual oleh tim PUSINTEK.
3. Perluasan pembayaran tukin, uang makan dan uang lembur dapat dilaksanakan setelah pengembangan sistem presensi dan aplikasi tukin di dalam aplikasi Satu Kemenkeu selesai.
4. Solusi atas permasalahan pada *piloting* Fase 1 baik dari sisi regulasi maupun aplikasi telah



dilakukan pembahasan dan disepakati oleh perwakilan masing-masing unit.

- b. Perbaikan dan penyempurnaan sistem tukin, uang makan, dan lembur, disepakati sebagai berikut:
1. Akan ada *scheduling* data presensi di HRIS
 2. Penambahan servis pada aplikasi gaji untuk menerima *link* dokumen dan akan disampaikan ke tim HRIS
 3. Penyiapan proses bisnis terkait perubahan data *grading* karena kesalahan perekaman
 4. Fitur *reset* TTE sudah disiapkan dan akan dirilis di *production*
 5. Pengajuan *Vulnerability Test* dan *Stress Test*
 6. Penyeragaman standar data/informasi yang dibutuhkan oleh *Core System* akan dilakukan

reviu kembali setelah fitur *scheduling* presensi selesai.

7. Pembuatan fitur tarik ulang data gaji akan dilakukan diskusi antara tim gaji dan tim SAKTI.
8. Pembagian golongan pegawai pada pendetilan CoA di aplikasi SAKTI tidak dapat dipenuhi karena data berasal dari perencanaan RKAKL.
9. Penambahan proses tanda tangan di aplikasi gaji akan dilakukan setelah pembayaran THR tahun 2024.

Pelaksanaan WBS untuk transaksi tukin, uang makan dan uang lembur yang diajukan *change request* sebagai berikut:

Task Name	Semula		Menjadi	
	Start	Finish	Start	Finish
Pengujian atas hasil penyempurnaan sistem tukin, uang makan dan lembur	1 Juli 2024	31 Des 2024	1 Juli 2024	31 Mar 2025
Transaksi perluasan <i>piloting</i> tukin fase 2	1 Jan 2025	31 Mar 2025	31 Mar 2025	30 Jun 2025
Transaksi perluasan <i>piloting</i> uang makan dan lembur fase 2	1 Jan 2025	31 Mar 2025	31 Mar 2025	30 Jun 2025

Common Expenses

- a. Perluasan *Common Expenses* Fase 1 kepada 6 K/L Ditetapkan dalam KMK nomor 1/KM.5/2024 tentang Pelaksanaan *Piloting* Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
- b. Perluasan *Common Expenses* kepada Seluruh K/L (kecuali Kementerian Pertahanan dan Polri) Ditetapkan dalam KMK Nomor 2/KM.5/2024 tentang Pelaksanaan *Piloting* Pembayaran Belanja Jasa Listrik dan Belanja Jasa Telekomunikasi dalam Rangka Pelaksanaan APBN melalui PPP pada K/L.

- c. Persiapan Proses Bisnis, Regulasi, dan Sistem IT pada Pemusatan Pagu *Common Expenses* lingkup Kementerian Keuangan di Tahun 2025

1. Telah dilaksanakan SIT (*System Integration Test*) pada 27 Desember 2024 antara *core system* (SAKTI) dan sistem mitra (PLN dan Telkom).

2. Telah dilaksanakan UAT (*User Acceptance Test*) pada 30 Desember 2024, dengan satker penguji Biro Umum Sekjen serta Setditjen Perbendaharaan.
3. Telah disepakati *draft* Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Piloting Pembayaran Belanja Operasional dengan Mekanisme Pagu Terpusat dalam Rangka Pelaksanaan APBN melalui PPP.

Perjalanan Dinas

Draft Kepdirjen Penetapan Interkoneksi dengan sistem pendukung perjadin dan draft KMK Penetapan Peserta *Piloting* Perjadin telah dilakukan penyusunan, yang selanjutnya dilakukan penetapan di tahun 2025.

Pelaksanaan WBS untuk transaksi perjalanan dinas yang diajukan *change request* sebagai berikut:

Task Name	Semula		Menjadi	
	Start	Finish	Start	Finish
Drafting Kepdirjen Penetapan Interkoneksi dengan sistem pendukung perjadin			1 Juli 2024	30 Sep 2024
Drafting KMK Penetapan Peserta <i>Piloting</i> Perjadin			1 Sep 2024	31 Okt 2024
Penetapan Kepdirjen Interkoneksi dengan sistem pendukung perjadin	1 Juli 2024	30 Sep 2024	1 Juli 2024	31 Mar 2025
Penetapan KMK Peserta <i>Piloting</i> Perjadin	1 Sep 2024	31 Okt 2024	1 Sep 2024	31 Mar 2025
Transaksi Perdana <i>Piloting</i> Perjadin	1 Nov 2024	31 Des 2024	1 Nov 2024	31 Mar 2025



Penyelesaian Kajian atas Desain *Single Billing* Transaksi Penerimaan Negara

Penyelesaian kajian atas desain *Single Billing* Transaksi Penerimaan Negara, yaitu dengan merancang MPN sebagai *single stop service*: pembuatan *billing*, pembuatan kode bayar, *settlement*, hingga akses publik untuk konfirmasi setoran. Rancangan *single billing* penerimaan negara yang diusulkan merupakan integrasi sistem di mana masing-masing UE-1 mengelola *back-end billing* dengan 2 (dua) opsi *front-end* yang dapat dipilih oleh WP/WB/WS yaitu:

1. *single front-end* di MPN; atau
2. *front-end* tetap di masing-masing UE-1, tetapi prinsip utamanya adalah kode bayar/kode *voucher/virtual account* yang dikenali CA harus merupakan kode yang ter-generate dari *settlement* MPN.

Dengan konsep *single billing* penerimaan negara yang baru, diharapkan akan memberikan fleksibilitas bagi para WP/WB/WS. Mereka dapat memilih untuk melakukan pembuatan *billing* melalui *website* MPN ataupun *website* masing-masing *biller*. Selain itu, rancangan ini akan mampu menyelesaikan masalah utama yang dihadapi WP/WB/WS yaitu *ID billing* yang tidak dapat dibayarkan karena *ID billing* tersebut tidak ditemukan pada MPN.

Terlaksananya Diseminasi Kajian atas Desain *Payment Gateway* Pemerintah

Terlaksananya diseminasi kajian atas desain *Payment Gateway* Pemerintah dengan rekomendasi 2 (dua) opsi desain, yaitu *in-house development* atau kerja sama dengan Pihak Ketiga (PJP). Kajian didasarkan atas hasil analisis *pros* dan *cons*, yaitu pengembangan PG secara *in-house* memiliki bobot paling tinggi, namun memiliki tantangan terkait lama waktu pengembangan. Oleh karena itu, rekomendasi dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Jangka pendek: penyediaan PG dilakukan dengan kerja sama dengan pihak eksternal.
2. Jangka menengah: penyediaan PG dilakukan dengan *in-house development*.

IS DATA ANALYTICS PENGEMBANGAN SIMULATION SYSTEM REALISASI APBN BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UIC Utama: Direktorat PKN dan Direktorat SITP

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pada era digital saat ini, pemerintah semakin mengandalkan sistem pembayaran elektronik untuk mempermudah proses administrasi dan pembayaran publik. Pengembangan sistem simulasi ini merupakan langkah strategis dalam rangka untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaksanaan anggaran di Kementerian Keuangan. Sistem ini dirancang untuk memberikan dukungan analitis dan simulasi yang dapat dimanfaatkan berdasarkan data historis yang ada sehingga dapat membantu dalam rangka pengelolaan APBN menjadi lebih tepat sasaran dan berdasarkan data yang valid serta relevan. Pengembangan sistem simulasi ini dibutuhkan dengan memperhatikan kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada Kementerian Keuangan dalam mengelola Kas Pemerintah. Saat ini, Kementerian Keuangan mengelola jumlah data keuangan yang besar dan kompleks, meliputi pendapatan, pengeluaran, dan berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Dengan pertumbuhan *volume data* yang pesat, semakin sulit untuk secara manual menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Hal ini berimbas pada ketidakpastian dan risiko dalam pengelolaan keuangan. Sistem simulasi ini diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan cepat, tepat, dan efektif, sehingga terhindar dari keterlambatan dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak negatif pada stabilitas keuangan dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, pengembangan sistem dalam konteks ini bertujuan untuk memberikan solusi teknologi yang

mampu mengolah data keuangan dengan cepat, memberikan wawasan yang mendalam, dan mendukung dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kas pemerintah.

Pengembangan sistem simulasi berbasis *artificial intelligence* ini bertujuan untuk menyimulasikan realisasi APBN, mendukung optimalisasi kas, serta mengelola risiko APBN secara lebih *prudent* dan akurat. Sistem ini menggunakan data historis yang relevan dari *environment Treasury Big Data* sejak tahun 2019 serta data dari forum *Cash Planning Information Network* (CPIN) yang diolah dengan teknologi AI, sehingga mampu menghasilkan proyeksi yang relevan dengan kondisi dinamis. Langkah ini juga mencakup pemanfaatan *Data Analytics* dan *Machine Learning* untuk integrasi data antar Eselon I dalam tim forum CPIN, serta optimalisasi pengelolaan kas yang lebih efisien dan dinamis. Melalui implementasi sistem simulasi berbasis AI, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi keuangan negara. Hal ini memungkinkan respons yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi dan perubahan kebijakan. Adapun *output* yang dihasilkan yaitu tersedianya sistem simulasi yang dapat menampilkan *analytical dashboard* kinerja keuangan yang memberikan gambaran visual tentang realisasi APBN, mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pos utama lainnya sesuai dengan skenario yang ditentukan, serta tersedia model interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan simulasi, mengubah



parameter, dan menganalisis dampaknya secara langsung. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu pengambil keputusan untuk memahami dampak kebijakan fiskal terhadap APBN dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih terintegrasi. Pemerintah juga dapat mengelola kas dengan lebih efisien melalui perencanaan arus kas yang tepat dan menghindari masalah likuiditas. Sistem simulasi ini menjadi alat penting untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan memperkuat stabilitas keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

END STATE



KEADAAN SAAT INI (BEFORE)

Menggunakan Web CPIN sebagai *platform* pada OMSPAN yang digunakan untuk *upload* data proyeksi dari masing-masing Eselon I Kemenkeu.

Menggunakan data proyeksi dengan menggunakan *economic model* untuk menghasilkan proyeksi penerimaan dan belanja negara.

Proses pengelolaan data dilakukan secara *semi manual* dengan berdasar atas data sumber yang ada pada *database* Web CPIN.

Tidak tersedianya sarana untuk dilakukan simulasi terhadap hasil perhitungan yang dihasilkan.

Belum memanfaatkan teknologi pengolahan data dan simulasi yang dapat dilakukan secara *realtime* sehingga dapat memberikan opsi kepada pengguna untuk mendapatkan gambaran proyeksi secara lebih komprehensif.

KEADAAN SETELAH IS DILAKSANAKAN (AFTER/END STATE)



Pengembangan lanjutan Web CPIN pada platform *Super Apps* Digit sehingga dapat lebih mengakomodir pengguna dengan *User Interface* yang menyesuaikan dengan *requirement user*.

Menghasilkan data proyeksi dengan menggunakan *machine learning model* untuk menghasilkan proyeksi penerimaan dan belanja negara yang terotomasi dan *real-time*.

Data yang digunakan untuk melakukan simulasi keseluruhannya berasal dari *database* baik data yang berasal dari Web CPIN maupun berasal dari data sumber IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*).

Disediakan platform untuk melakukan simulasi terhadap proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara dengan *back-end* penggunaan modeling berbasis *artificial intelligence* dan *front-end* menggunakan *User Interface* yang dapat digunakan oleh *user*.

Menggunakan beberapa fungsi *Artificial Intelligence* untuk dapat memberikan opsi proyeksi penerimaan dan belanja negara sehingga dapat memberikan *insight* yang lebih luas kepada pengguna maupun pengambil kebijakan.



CAPAIAN

Capaian signifikan IS Simplifikasi Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara antara lain:

- a. Dokumen kebutuhan (*requirement document*) berhasil disusun berdasarkan proses bisnis yang berkaitan dengan sistem simulasi yang dikembangkan.
- b. Pendefinisian sumber data yang akan digunakan dalam pemodelan data telah diselesaikan dengan mengacu pada kebutuhan sistem.
- c. Studi literatur dan *benchmarking*, baik secara *on-desk* maupun *off-desk*, telah dilakukan terhadap negara atau institusi yang telah mengimplementasikan sistem serupa sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran.
- d. Dokumen rancangan arsitektur sistem simulasi kini tersedia dan siap digunakan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut.
- e. Versi lanjutan dari pengembangan web CPIN kini dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan unggah data secara mandiri.
- f. Sumber data dari lingkungan *Treasury Big Data* sudah dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses simulasi.
- g. Pengembangan algoritma dan model *artificial intelligence* yang digunakan dalam sistem simulasi telah dilaksanakan sesuai rencana.
- h. Model yang dikembangkan telah melalui tahap uji coba dan evaluasi guna memastikan akurasi dan performanya.
- i. Proses *deployment* terhadap model dan sistem yang telah dievaluasi telah dilakukan, sehingga sistem simulasi dapat mulai dioperasikan.



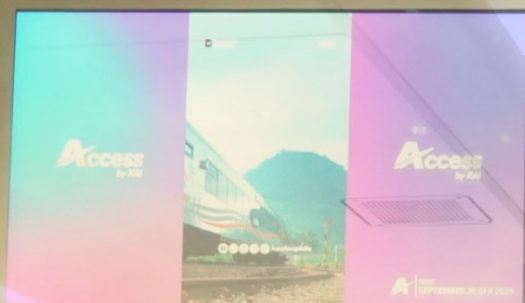
CURRENT
STATION
Bandung (BD)

0 kph EKS
21 °C

INKA
INDONESIA

121

K1 0 24 28



03

Modernization in Motion

Inovasi bukan hanya tentang melahirkan sesuatu yang benar-benar baru, tetapi juga tentang memperbaiki yang sudah ada agar tetap relevan dan bermanfaat. Melalui modernisasi sarana perkeretaapian, gerbong lama diremajakan menjadi armada yang lebih andal dan modern guna meningkatkan kualitas layanan dan menghadirkan pengalaman baru bagi pelanggan.

Selaras dengan semangat modernisasi tersebut, *core system* Perbendaharaan yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), juga terus diperbarui dan dikembangkan untuk mendukung inovasi berkelanjutan. Fondasi yang sudah kokoh diperkuat agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna layanan, menghadirkan layanan perbendaharaan yang tangguh, adaptif, dan akuntabel.



QUICKWINS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2024

GAMBARAN UMUM

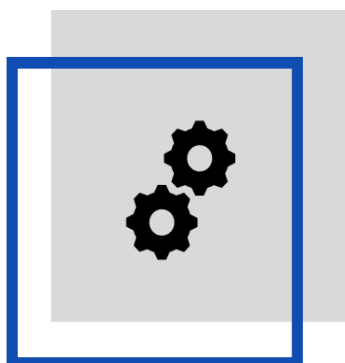
Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan serta pencapaian inisiatif strategis Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara konsisten merumuskan langkah strategis yang dituangkan dalam *Quickwins*. *Quickwins* merupakan inisiatif kegiatan di DJPb yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam rangka membangun momentum awal yang positif serta kepercayaan diri untuk mendorong pelaksanaan reformasi dan transformasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan *Quickwins* diharapkan dapat menciptakan solusi cepat terhadap tantangan operasional dan kebutuhan pelayanan publik, serta menjadi bentuk komitmen DJPb dalam mendukung tercapainya tata kelola keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel. Setiap inisiatif *Quickwins* dirancang secara terukur, sederhana, dan dapat diimplementasikan tanpa menunggu perubahan regulasi yang kompleks. Secara umum, *Quickwins* DJPb difokuskan pada

penguatan proses bisnis inti, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia.

Melalui pelaksanaan *Quickwins*, DJPb berupaya untuk terus membangun kepercayaan publik serta menciptakan budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Inisiatif-inisiatif ini juga menjadi bagian integral dari peta jalan transformasi DJPb menuju *Treasury* yang modern dan unggul di tingkat dunia. DJPb merumuskan *Quickwins* setiap tahun serta dicantumkan pada *Treasury Charter* yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan ditandatangani oleh seluruh Pimpinan *Unit in Charge* (UIC) Eselon II Kantor Pusat DJPb.

Treasury Charter tahun 2024 ditandatangani secara elektronik menggunakan *digital signature* oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh Pimpinan UIC. *Treasury Charter* Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan mulai tahun 2015 dan memasuki tahun ke-10 pada tahun 2024. Adapun *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2024 adalah:

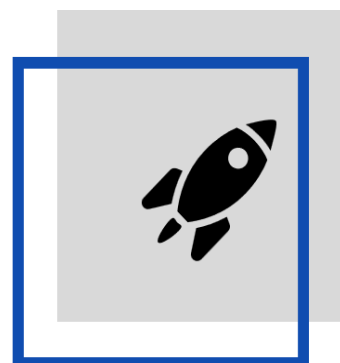


Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan

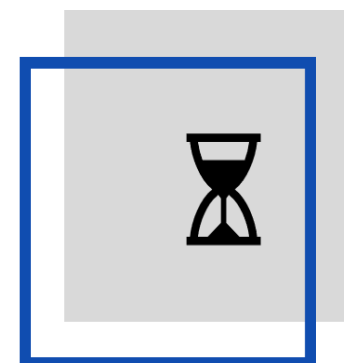
- Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)
- Optimalisasi Skema Scheduled Payment Date (SPD) melalui Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA)
- SAKTI BLU
- Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun



Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja



Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan *Generalized* (SIPKK-G)



Pengembangan *Anomaly Detection* Dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah



SINERGI PENGUATAN LAYANAN PERBENDAHARAAN

UIC: Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Sistem Perbendaharaan, serta Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

LATAR BELAKANG

Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Pada tahun 2023 Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam Perpres tersebut Pemerintah telah mencanangkan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pencairan dana belanja bantuan sosial telah dilaksanakan melalui aplikasi SPAN/SAKTI namun data penerima manfaat bantuan sosial belum semua didapatkan. Dalam mendukung portal pembayaran yang terintegrasi dalam SPBE maka perlu dikembangkan aplikasi Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*) yang berfungsi sebagai sinkronisasi data penyaluran yang terkoneksi dengan data penerima manfaat (*beneficiary registry*) dan pemberian penandaan bagi penerima manfaat bantuan sosial/bantuan pemerintah.

Saat ini, sedang dikembangkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah, sedangkan belum terdapat sarana

penghubung antara K/L dengan basis data pendukung untuk proses sinkronisasi, verifikasi dan validasi, serta sistem pembayaran baik di Kementerian Keuangan maupun perbankan. Agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi, maka diperlukan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*) direncanakan untuk dikembangkan secara bertahap mulai tahun 2024 secara bersamaan dengan mekanisme penyaluran dan penyempurnaan dasar hukum penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah.

Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date (SPD)* melalui Penerapan *Robotics Process Automation (RPA)*

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi baru yang mendorong transformasi proses bisnis di berbagai bidang kehidupan. Beberapa tren teknologi yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan, pemerintah maupun masyarakat umum antara lain *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing*, *Machine Learning*, dan *Robotic Process Automation (RPA)*.



Penggunaan berbagai teknologi baru tersebut diharapkan dapat membantu proses penyelesaian pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan efektif. Salah satu teknologi yang semakin banyak dimanfaatkan baik oleh perusahaan maupun pemerintah adalah teknologi RPA yang memungkinkan otomatisasi tugas-tugas yang dilakukan berulang dengan menggunakan *software bot* yang beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai institusi pengelola keuangan negara sampai dengan saat ini belum memaksimalkan penggunaan teknologi RPA untuk membantu penyelesaian tugas dan fungsinya meskipun dalam beberapa proses bisnisnya terdapat jenis pekerjaan yang secara karakteristiknya memungkinkan untuk dilakukan dengan bantuan RPA.

Salah satu proses bisnis yang berpotensi untuk dapat dilakukan dengan bantuan RPA adalah proses penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN untuk optimalisasi *Scheduled Payment Date* (SPD) sehingga pembayaran

tagihan negara bisa dilakukan secara tepat waktu kepada para penerima manfaat, kontraktor, dan pihak lainnya yang terlibat dalam berbagai program dan proyek pemerintah.

Proses penyelesaian SPM menjadi SP2D di KPPN merupakan proses bisnis utama yang dilakukan secara rutin dan berulang. Proses penelitian dan pengujian SPM masih dilakukan secara manual oleh pegawai KPPN sehingga membutuhkan ketelitian dan waktu pemrosesan yang cukup lama. Untuk meningkatkan kualitas penyelesaian tugas-tugas administratif tersebut, perlu dilakukan kajian untuk menganalisis kemungkinan penggunaan teknologi RPA untuk optimalisasi SPD dalam proses penyelesaian SPM menjadi SP2D di KPPN.

SAKTI BLU

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), menyebutkan bahwa pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana dalam pengelolaannya tidak murni seperti satker pemerintah biasa, BLU dikelola ala bisnis (*business like*).



BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

Dalam rangka mencapai tujuan BLU tersebut dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keleluasaan yang dimiliki, tercipta beberapa proses bisnis yang berbeda dibandingkan dengan satker pada umumnya. Keunikan proses bisnis tersebut mencakup mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban.

Dalam implementasinya, belum ada sistem terstandar untuk pengelolaan keuangan BLU tersebut, karena masing-masing BLU mengembangkan sistem sendiri. Sistem pengelolaan keuangan pada Satker BLU yang digunakan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban terdiri dari bermacam-macam aplikasi dengan *database* terpisah sehingga terjadi redudansi data, inefisiensi investasi perangkat IT, yang berpengaruh terhadap keamanan, kecepatan, serta akurasi transaksi dan konsolidasi data laporan keuangan.

Selain itu, Penyampaian dokumen tagihan secara fisik ke BU-BLU yang berpotensi terjadinya *fraud* dan inefisiensi biaya operasional, serta masih terdapat laporan keuangan yang belum disusun berdasarkan basis akrual secara transaksional. Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merekomendasikan agar SAKTI dapat digunakan secara penuh untuk seluruh fitur pada SAKTI BLU.

Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

Berdasarkan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan atas transaksi investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang salah satunya meliputi pengelolaan kas. Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, efisiensi, efektivitas, independensi, dan kewajaran. Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan kas dengan menyusun dan memutakhirkan asumsi-asumsi ekonomi dan prakiraan pendapatan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan kas, saat ini Direktorat Sistem Perbendaharaan telah mengembangkan sistem aplikasi yang memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan keuangan berupa pembayaran belanja pegawai yang ditetapkan dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) secara Elektronik.



Elektronifikasi penyampaian dokumen lampiran syarat pengajuan pembayaran JHT/pensiun melalui otomasi pengiriman SKPP secara elektronik ke sistem PT Taspen/PT Asabri akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan program jaminan hari tua/pensiun, serta percepatan pembayaran pensiun pada hari pertama pada bulan TMT pensiun yang akan bermanfaat bagi kurang lebih kepada 65.000 pegawai yang rata-rata pensiun setiap tahunnya. Percepatan pembayaran pensiun tersebut tentunya dapat mengurangi potensi *fraud* dan selaras dengan prinsip pembayaran dilakukan secara langsung ke rekening penerima.

Selain itu, SKPP secara elektronik mendukung *monitoring* proyeksi pegawai yang akan pensiun sehingga dapat membantu dalam perencanaan penganggaran dan proyeksi kebutuhan tagihan BUN (pembayaran pensiun). Pada prinsipnya, tujuan yang ingin dicapai dalam proses bisnis integrasi layanan pensiun ini adalah untuk menyusun mekanisme dan tata kelola pembayaran menjadi semakin baik seiring dengan modernisasi dan perkembangan era yang mendukung pembangunan *Next Treasury* dan *SPAN Next G*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikembangkan simplifikasi dan digitalisasi proses bisnis pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dalam rangka penguatan layanan Perbendaharaan yang meliputi:

1. Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*).
2. Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* (SPD) melalui Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA).
3. SAKTI BLU.
4. Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun.



CAPAIAN

Pencapaian pelaksanaan *Quickwins* Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan dapat dilihat dari tercapainya *Acceptance Criteria* berupa:



Pengembangan Pemeta Data Pusat (Central Mapper)

Terbangunnya sistem aplikasi Pemeta Data Pusat

01



Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* (SPD) Melalui Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA)

Tersedianya kajian yang komprehensif mengenai desain transformasi digital proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan negara beserta optimalisasi kas negara di perbankan

02



SAKTI BLU

Terlaksananya pengembangan SAKTI BLU dengan tahapan:

- Penyusunan kajian dan pembahasan konsep SAKTI BLU
- Penyusunan UR Modul dan flowchart bisnis proses SAKTI BLU
- Finalisasi UR Modul

03



Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

Terbangunnya interkoneksi antara Aplikasi Gaji Web Kemenkeu dengan sistem Taspen Online Service (TOS)

04

Dalam mencapai *Acceptance Criteria* dari Quickwin Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Pembentukan Tim Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Pembentukan susunan tim kerja penyusunan proses bisnis Pemeta Data Pusat tahun 2024 pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Tim Pengembangan Pemeta Data Pusat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor Nomor KEP-8/PB.2/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Proses Bisnis Pengembangan Pemeta Data Pusat pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

Study Literasi Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Pelaksanaan kajian terkait *best practice* pengelolaan bantuan sosial, identifikasi karakteristik bantuan sosial di Indonesia, identifikasi tantangan pelaksanaan *Central Mapper* khususnya terkait dengan bantuan sosial di Indonesia, dan analisis pengembangan *Central Mapper*, dengan rincian sebagai berikut:

1. *Best Practice* Pengelolaan Bantuan Sosial yaitu World Bank *Next Generation G2P Payments* dan G2P di India.
2. Pengembangan *Central Mapper* di Indonesia meliputi karakteristik bantuan sosial di Indonesia; tantangan pelaksanaan *Central Mapper* di Indonesia; dan pengembangan *Central Mapper* di Indonesia.

Penyusunan Asesmen Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Identifikasi mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan sosial, serta identifikasi struktur data detail penerima manfaat bantuan sosial. Dalam hal ini, telah dilaksanakan koordinasi terkait *assessment* Data Pemeta Data Pusat bersama Kementerian/Lembaga penyalur bantuan sosial untuk penyeragaman struktur data yang disampaikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada FGD *Aessment* Kebutuhan dan Pemutakhiran Data tanggal 16 s.d. 18 Mei 2024.



Pembahasan Penyempurnaan Pengembangan *Central Mapper* Internal

Pembahasan penyempurnaan Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*) lingkup internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi:

1. Pembahasan mengenai rencana kerja pengembangan *Central Mapper*.
2. Pembahasan mengenai mekanisme penyaluran dengan *Affiliated Supplier* sebagai pendukung implementasi *Central Mapper*.
3. Konsolidasi data penerima manfaat penyaluran bantuan sosial.
4. Finalisasi struktur data detail penerima manfaat bantuan sosial yang akan diintegrasikan dengan sistem *Central Mapper*.
5. Pembahasan persiapan uji coba penyaluran bantuan sosial.

Penyempurnaan Pengembangan *Central Mapper* Eksternal

Pembahasan penyempurnaan Pengembangan *Central Mapper* lingkup eksternal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, meliputi:

1. Sosialisasi mengenai rencana pengembangan *Central Mapper*, dan Implementasinya pada Kementerian/Lembaga dan bank penyalur bantuan sosial.
2. Sosialisasi mengenai asesmen terkait kebutuhan data historis penyaluran bantuan sosial sebagai basis data sistem *Central Mapper*.
3. Sosialisasi mengenai persiapan uji coba penyaluran bantuan sosial dengan K/L penyalur.
4. *One-on-one meeting* dengan K/L terkait mengenai konsolidasi data.
5. Pemutakhiran data penerima manfaat.

Uji coba dan *monitoring* evaluasi uji coba sistem aplikasi *Central Mapper*

Uji coba dan *monitoring* evaluasi uji coba sistem aplikasi Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*), meliputi:

1. *Piloting* dan pelaksanaan uji coba penyaluran bantuan sosial.
2. Evaluasi hasil pelaksanaan uji coba.
3. *Ekspose* data penyaluran bantuan sosial pada Aplikasi *Central Mapper* dan *Showcase* Aplikasi *Central Mapper*.

Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date (SPD)* melalui Penerapan *Robotic Process Automation (RPA)*

1. Kajian Akademis yang dilaksanakan melalui:
 - a. Studi literatur definisi dan konsep *Robotic Process Automation (RPA)*.
 - b. Studi literatur implementasi RPA di industri/lembaga pemerintah di dalam/ luar negeri.
 - c. Studi literatur terkait langkah-langkah penerapan RPA dalam sistem yang sudah berjalan (*legacy*).
2. Pembahasan dan pencarian informasi dengan pihak terkait Direktorat Kanpus DJPb dan Kantor Vertikal DJPb yang dilaksanakan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* dengan Direktorat SITP dan KPPN di bulan Mei 2024.
3. *Benchmarking* dengan Direktorat Jenderal Pajak di bulan Juni 2024.
4. *Focus Group Discussion* Konsep Awal Kajian di bulan Juli 2024.
5. Penyelesaian kajian di bulan Desember 2024.
6. Kegiatan diseminasi hasil kajian dilaksanakan di bulan Desember 2024.

SAKTI BLU

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target *Quickwins* SAKTI BLU adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Praktis Penyusunan SAKTI BLU yang telah dilaksanakan di bulan Januari.
2. Pembahasan konsep SAKTI BLU antara Direktorat PPKBLU dengan Direktorat SITP yang telah dilaksanakan di bulan Februari.
3. Pengembangan UR Modul berupa penyampaian *User Requirements* 12 modul ke Direktorat SITP pada bulan Maret. Selain itu, telah diselesaikan pembahasan 2 modul, yaitu modul penganggaran dan modul administrasi *user*.
4. Penyusunan *roadmap* pengembangan dan implementasi dengan penyelesaian pengembangan 2 modul, yaitu modul penganggaran dan modul administrasi *user*.
5. Pengembangan Sistem modul administrasi *user* dan penganggaran di bulan November. Selain itu, telah dilakukan *End User Training* untuk *user* pegawai Direktorat PPKBLU dan *End User Training* kepada Satker.



Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

Pembahasan Proses Bisnis dan SIT Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama

Sehubungan dengan Undangan Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor UND-192/PB.7/2024 tanggal 9 Juni 2024, telah dilaksanakan rapat teknis Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama dan/atau Jaminan Hari Tua (JHT) pada tanggal 12 – 14 Juni 2024 di Sentul Bogor. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari DJPb (Dit. SP, Dit. SITP, Dit. PA dan Setditjen) dan PT Taspen (Persero).

Pelaksanaan *User Acceptance Test* dan Uji Coba Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama

Telah diselenggarakan pembahasan proses bisnis dan *User Requirement* serta *User Acceptance Test* atas Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama pada tanggal 4 – 6 Juli di Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari DJPb (Dit. SP, Dit. SITP, Dit. PA, dan Setditjen), PT Taspen (Persero), serta satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara dan KPPN Jakarta I sebagai Satker dan KPPN *piloting* kegiatan simulasi proses bisnis terkait.

Kegiatan UAT ini dilakukan sebanyak dua kali pada pegawai dengan data BUP Juli 2024 dan Agustus 2024. Pelaksanaan UAT tersebut dimulai dari penginputan SKPP oleh Satker, pengesahan SKPP di KPPN hingga pengiriman data ke pihak PT Taspen (Persero).

Pelaksanaan *Launching* dan Sosialisasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama

Telah dilakukan *launching* dan sosialisasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama secara daring melalui zoom meeting pada tanggal 19 Juli 2024. *Launching* dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero), Direktur Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, seluruh Direksi Kantor Pusat PT Taspen (Persero), para Kepala Kanwil dan KPPN, serta seluruh Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero).

Pelaksanaan Internalisasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama

Sebagai bagian dari pelaksanaan *Quickwins* DJPb “Aplikasi Integrasi Pembayaran Pensiun Pertama”, telah dilaksanakan internalisasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan/atau klaim jaminan hari tua (JHT) dan evaluasi implementasi eSKPP Fase I. Pelaksanaan kegiatan internalisasi diselenggarakan di 3 (tiga) tempat, yaitu Kanwil DJPb Sulawesi Tenggara, Kanwil DJPb Maluku Utara, dan KPPN Kediri pada bulan Agustus 2024. Kegiatan internalisasi juga melibatkan PT Taspen (Persero) cabang setempat, KPPN, dan perwakilan Satker.



TEROBOSAN

Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Kegiatan dalam rangka implementasi pengembangan pemeta data pusat telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Dalam proses pengembangannya, dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian dan Bank Penyalur bantuan sosial, agar dapat dilakukan konsolidasi data historis penerima bantuan sosial.

Kemudian dalam pengembangannya, untuk mendukung implementasi Aplikasi *Central Mapper* kedepan, telah dibentuk suatu mekanisme penyampaian SPM yang baru, yaitu mekanisme *affiliated supplier* dengan proses bisnis penyaluran SP2D dengan menggunakan metode pengelompokan banyak rekening penerima yang telah divalidasi dalam suatu kode *referral*. Mekanisme ini mendukung implementasi aplikasi *Central Mapper*, dimana penyampaian SPM Belanja Bantuan Sosial akan dilengkapi dengan data detil penerima yang akan terintegrasi langsung dengan aplikasi *Central Mapper*. Atas pelaksanaan pengembangan sampai dengan tahapan uji coba, telah didapatkan beberapa hasil atas evaluasi langsung implementasi kegiatan-kegiatan dimaksud sebagai berikut:



Terobosan Pelaksanaan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

1. Terjadinya percepatan atas penyaluran bantuan sosial/bantuan pemerintah
2. Meningkatnya keakuratan data penerima manfaat
3. Meningkatnya akuntabilitas atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial/bantuan pemerintah
4. Meningkatnya kemudahan atas pelaksanaan bantuan pemerintah
5. Mendukung penyaluran bantuan secara non tunai dan keuangan inklusif.



Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date (SPD)* melalui Penerapan *Robotic Process Automation (RPA)*

Saat ini, pemrosesan SPM menjadi SP2D di KPPN sudah dilakukan secara digital sehingga dimungkinkan untuk diterapkan RPA khususnya dalam proses penelitian dan pengujian SPM. Penerapan RPA tersebut dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi penyelesaian SPM serta ketepatan SPD.

Implementasi RPA dalam proses penelitian dan pengujian SPM dapat dilakukan secara bertahap dimulai dengan dengan jenis SPM dengan tingkat risiko rendah/potensi kesalahan kecil yaitu SPM Tagihan Langgan Daya dan Jasa melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan SPM GUP Kartu Kredit Pemerintah.

Pembangunan dan pengembangan RPA dapat dilakukan secara *in house* dengan melibatkan beberapa unit terkait di Ditjen Perbendaharaan. Sehingga hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi dasar dan rujukan bagi DJPb untuk menganalisis kemungkinan penggunaan teknologi RPA untuk optimalisasi SPD dalam proses penyelesaian SPM menjadi SP2D di KPPN.

SAKTI BLU

Tujuan pengembangan sistem SAKTI BLU adalah menyediakan satu sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN untuk satker BLU. Selain itu, SAKTI BLU dapat memangkas biaya operasional penyampaian dokumen tagihan oleh satuan kerja ke BLU-BLU hingga mencapai 100%, penggunaan TTE tersertifikasi pada dokumen tagihan negara sehingga proses verifikasi dilakukan otomatis oleh sistem, turunnya nilai deviasi proyeksi pengeluaran kas BLU, menyusun laporan keuangan berdasar basis *full* akrual secara transaksional, dan terpenuhinya rekomendasi BPK atas LKPP 2022, serta dapat mencatat informasi PDN/TKDN yang memadai.

Dengan memanfaatkan teknologi *cloud computing* dengan *container platform*, SAKTI menyediakan akses yang mudah dan fleksibel bagi pengguna. Konsep *maker, checker*, dan *approval* menjamin transaksi diverifikasi sesuai kewenangan, sementara pembayaran langsung kepada penerima manfaat meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyaluran dana BLU.



Terobosan SAKTI BLU

1. Integrasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN untuk satker BLU.
2. Memangkas biaya operasional penyampaian dokumen tagihan oleh satker ke BLU-BLU hingga mencapai 100%,
3. Penggunaan TTE tersertifikasi pada dokumen tagihan negara,
4. turunnya nilai deviasi proyeksi pengeluaran kas BLU,
5. Menyusun laporan keuangan berdasar basis full akrual secara transaksional, dan terpenuhinya rekomendasi BPK atas LKPP 2022.
6. Dapat mencatat informasi PDN/TKDN yang memadai .



Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama termasuk JHT melalui aplikasi Gaji dengan Aplikasi TOOS telah terbukti memberi dampak yang signifikan bagi ASN Pusat khususnya terkait dengan kemudahan ASN Pusat selaku calon pensiunan.

Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang telah tercatat pada Satker K/L dan Taspen secara terintegrasi
2. Percepatan penyampaian dokumen SKPP & Pembayaran hak peserta
3. Efisiensi waktu & biaya peserta untuk mengurus SKPP
4. Layanan terdigitalisasi dan tepat waktu pembayaran
5. Pengembangan aplikasi untuk Otomatisasi Klaim tanpa dokumen persyaratan lainnya (input data)

Saat ini, integrasi layanan masih terbatas pada calon pensiunan yang berasal dari ASN Pusat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan manfaat integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT juga diperuntukkan bagi Anggota Polri, Prajurit TNI dan ASN Kemenhan.

Integrasi layanan tersebut dilakukan melalui integrasi antara aplikasi Gaji milik DJPb dengan aplikasi *Backoffice* dan Pelayanan Terpadu milik PT Asabri (Persero).

Selain itu perluasan manfaat integrasi layanan antara aplikasi Gaji milik DJPb dan aplikasi TOOS milik Taspen tidak hanya digunakan untuk pembayaran pensiun pertama dan JHT, tetapi

juga pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan demikian, pegawai akan mendapatkan kemudahan baik dari sisi administrasi maupun klaim untuk pembayaran pensiun pertama, JHT, JKK dan/atau JKM.



Terobosan Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

1. **Hutang telah tercatat pada Satker K/L dan PT Taspen secara terintegrasi**
2. **Percepatan penyampaian dokumen SKPP & Pembayaran hak peserta**
3. **Efisiensi waktu & biaya peserta untuk mengurus SKPP**
4. **Layanan terdigitalisasi dan tepat waktu pembayaran**
5. **Pengembangan aplikasi untuk Otomatisasi Klaim tanpa dokumen persyaratan lainnya (input data)**

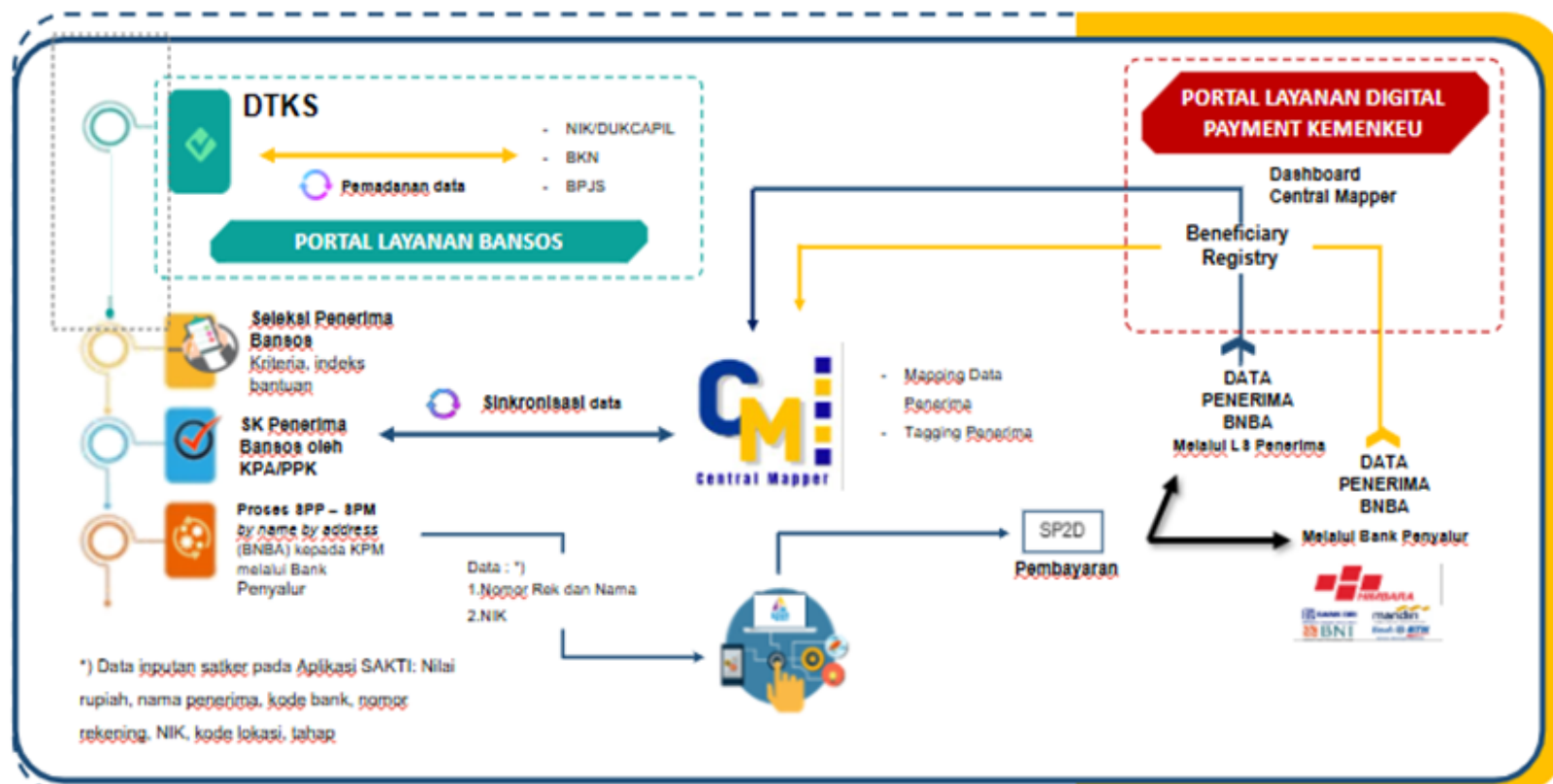


PROSES BISNIS

Adapun proses bisnis dari *Quickwins* Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Skema penyaluran bansos dengan *Central Mapper*:





1. **Login Digit**

Dashboard *Central Mapper* terintegrasi dengan aplikasi Digit. Aplikasi *Central Mapper* dapat diakses setelah *user login* menggunakan *user Digit*.

2. **Beranda Digit**

Tampilan halaman utama setelah *login* aplikasi Digit User dapat memiliki aplikasi yang diperlukan.

3. **Menu Role Dashboard Central Mapper**

User dapat memilih *level/role* yang akan digunakan.

4. **Dashboard Bansos**

Dashboard K/L *Central Mapper* menyajikan 10 data tabel/grafik dengan rincian sebagai berikut:

a. Informasi Penyaluran

Data informasi penyaluran pada *dashboard* terdiri atas tiga pilihan sajian data, sebagai berikut:

1) Kategori Bantuan 5

Menyajikan nominal penyaluran dan banyaknya NIK penerima

manfaat atas penyaluran bantuan sosial per jenis bantuan. Data yang disajikan pada *dashboard* berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan pada tahun tertentu (tahun yang dipilih).

2) Bank Penyalur

Menyajikan nominal total penyaluran dan banyaknya NIK penerima manfaat atas penyaluran bantuan sosial pada bank tertentu. Data yang disajikan pada *dashboard* berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan pada tahun tertentu (tahun yang dipilih).

3) Kementerian

Menyajikan nominal total penyaluran dan banyaknya NIK penerima manfaat atas penyaluran bantuan sosial pada kementerian penyalur tertentu. Data yang disajikan pada *dashboard* berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan pada tahun tertentu (tahun yang dipilih).



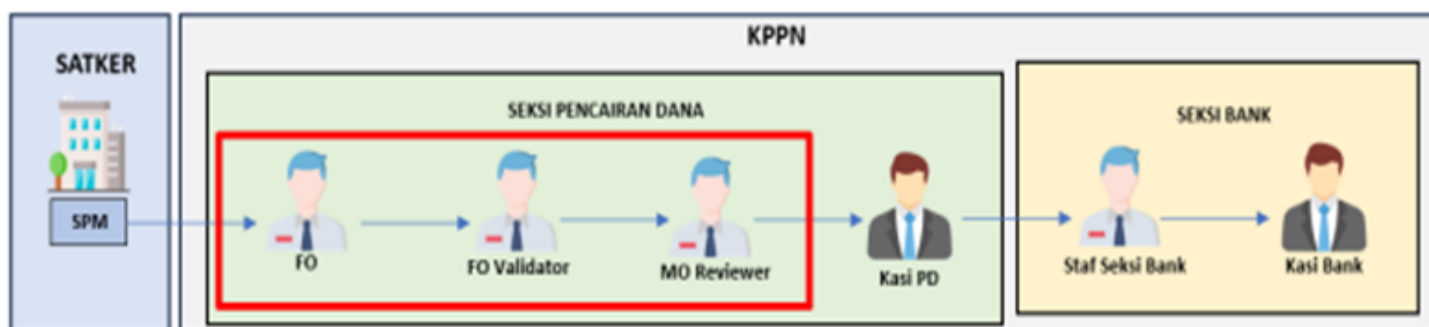
- b. *Top 5 Nilai Penyaluran per Provinsi*
Menyajikan wilayah dengan penyaluran bantuan sosial tertinggi per provinsi. Data yang disajikan dapat difilter menurut kabupaten/kota.
- c. *Top 5 Nilai Penyaluran per Provinsi*
Menyajikan wilayah dengan penyaluran bantuan sosial tertinggi per provinsi. Data yang disajikan dapat difilter menurut kabupaten/kota.
- d. *Potensi Duplikasi*
Menyajikan data berisi potensi jumlah NIK yang mendapatkan lebih dari 1 bantuan dalam 1 periode/tahun berisi jumlah NIK penerima dan jumlah nilai bansos yang diterima.
- e. *Irisan*
Menyajikan data data irisan populasi penerima bantuan berdasarkan jenis bantuan, berisi jumlah duplikasi, kombinasi jenis bansos, penerima, diurutkan berdasar jumlah penerima terbesar (*top 5*).
- f. *Total Penyaluran*
Menyajikan nominal besaran penyaluran bantuan.
 - 1) Data yang disajikan merupakan jumlah nominal berdasarkan data realisasi penyaluran pada tahun tertentu (tahun yang dipilih).
 - 2) Data yang disajikan dapat difilter menurut wilayah, jenis bansos, dan tahun.
- g. *Total Penerima Unik*
Menyajikan banyaknya penerima bantuan/subsidi yang tervalidasi. Data yang disajikan dapat difilter menurut wilayah, jenis bansos, dan tahun.
- h. *Demografi Penerima*
Menyajikan data distribusi bantuan/subsidi berdasarkan jenis kelamin penerima bantuan.
- i. *Demografi Tahun Kelahiran Penerima*
Menyajikan data distribusi bantuan/subsidi berdasarkan tahun lahir penerima bantuan.
- j. *Tren Nilai Penyaluran*
Menyajikan grafik berisi perbandingan besaran penyaluran perjenis bantuan sosial dan subsidi berdasarkan tahun dan (yoy) tahun sebelumnya.



Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* (SPD) Melalui Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA)

Rancangan Penerapan RPA dalam Proses Penelitian dan Pengujian SPM:

Sebelum Penerapan RPA:



Setelah Penerapan RPA:





Sesuai gambar di atas, proses penelitian dan pengujian SPM yang semula dilakukan oleh petugas FO dan MO di seksi pencarian dana akan digantikan oleh sistem RPA sehingga bisa dilakukan efisiensi pegawai dari semula tiga pegawai yang diperlukan untuk meneliti dan menguji SPM menjadi hanya satu pegawai yang difungsikan untuk memonitor, mereviu, dan menindaklanjuti hasil penelitian dan pengujian SPM oleh RPA. Proses bisnis penyelesaian SPM menjadi SP2D di KPPN pasca penerapan RPA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Satker mengirimkan SPM melalui aplikasi SAKTI satker ke KPPN. Selain terkirim ke aplikasi SAKTI KPPN, ADK SPM dari satker juga terkirim ke sistem RPA.
2. Robot RPA (RPA Bot) akan melakukan penelitian dan pengujian SPM yang disampaikan oleh satker dan mengirimkan hasil penelitian dan pengujian SPM ke aplikasi SAKTI KPPN.
3. Staf Seksi Pencarian Dana memproses SPM apabila telah menerima hasil penelitian dan pengujian SPM oleh Robot. SPM yang memenuhi persyaratan/ketentuan akan diproses lebih lanjut sedangkan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan akan ditolak dan dikembalikan ke satker untuk diperbaiki.

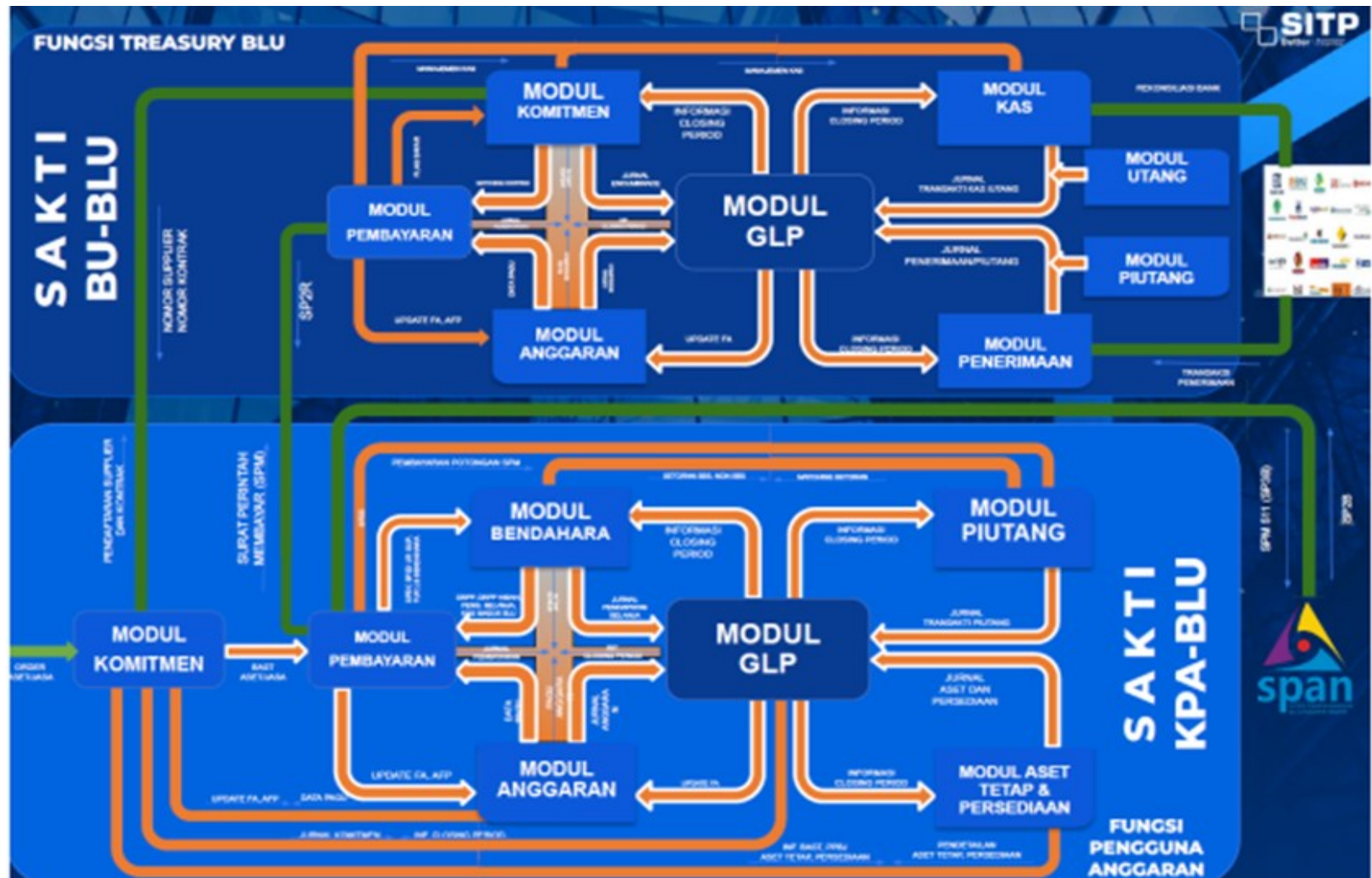
4. Kepala Seksi Pencairan Dana Kasi melakukan reviu SPM/Data Tagihan dan menyetujui/menolak SPM/Data Tagihan sesuai hasil reviu.
5. Staf Seksi Bank memproses Data Tagihan.
6. Kepala Seksi Bank menyetujui/menolak Data Tagihan.

Sistem RPA (RPA System) dibangun dan dikembangkan terpisah dari *Treasury Core System* (SAKTI dan SPAN) agar tidak membebani dan mengganggu operasionalisasi *Treasury Core System*. Sistem RPA juga dirancang agar mampu menyesuaikan dengan arsitektur IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*) yang berjalan saat ini maupun pengembangannya di masa mendatang. Oleh karena itu, rancangan penerapan RPA dalam proses penelitian dan pengujian SPM mencakup kondisi saat ini di mana proses pemrosesan SPM di KPPN masih menggunakan dua aplikasi *Treasury Core System* yaitu SAKTI dan SPAN yang belum terkoneksi/terhubung maupun pengembangannya ke depan di mana SAKTI dan SPAN sudah terkoneksi/terhubung dan terintegrasi menjadi satu aplikasi.



SAKTI BLU

Desain arsitektur SAKTI BLU dibagi menjadi 2 (dua subsistem, yaitu SAKTI KPA-BLU dan SAKTI BU-BLU).





1. Modul Administrasi User

2. Modul Penganggaran

Modul ini menjelaskan deskripsi serta proses bisnis yang ditatausahakan oleh modul penganggaran pada SAKTI KPA-BLU dan SAKTI BU-BLU, mencakup proses penyusunan RBA Indikatif, RBA RKA, RBA Definitif, Revisi RBA, DIPA Petikan BLU, dan Revisi DIPA Petikan BLU.

3. Modul Aset Tetap

Modul Aset Tetap berfungsi mengelola transaksi masuk atau keluar atas aset yang dimiliki satker, seperti perolehan yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun cara perolehan lainnya; transfer antar satker maupun internal satker; hibah masuk atau keluar; penghapusan terhadap barang usang atau rusak; koreksi; penghapusan; reklasifikasi; dan pelaporan.

4. Modul GLP

Modul GLP ini bertujuan untuk memuat seluruh proses terkait akuntansi dan pelaporan.

5. Modul Persediaan

Modul persediaan berfungsi mengelola transaksi masuk atau keluar atas persediaan yang dimiliki satker, seperti Transaksi Masuk; Transaksi Keluar; Koreksi; Opname Fisik; Tutup Buku; Referensi; dan Persediaan dalam Proses.

6. Modul Piutang

Modul Piutang BLU ini bertujuan untuk memuat seluruh proses penatausahaan, penagihan, penyelesaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban piutang BLU.

7. Modul Komitmen

Modul Komitmen adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi *cash miss match*.

8. Modul Pembayaran

Pembayaran bersumber dana PNPB BLU pada Modul Pembayaran SAKTI BLU adalah kebutuhan pengguna (*user requirement*) bagi Operator untuk melakukan proses pembayaran menggunakan SAKTI BLU.

9. Modul Bendahara

Modul Bendahara merupakan salah satu modul pada SAKTI BLU yang berfungsi menatausahakan proses Pengajuan, Pelaksanaan Pembayaran, Pencatatan, dan Pertanggungjawaban Uang Muka BLU.

10. Modul Kas

Modul Kas pada SAKTI BLU memiliki tujuan utama untuk melakukan proses pemindahan dana dari rekening operasional pengeluaran BLU kepada rekening penerima SP2R. Proses pada modul ini dilakukan oleh Bendahara Umum BLU.

11. Modul Penerimaan

Modul Penerimaan SAKTI BLU berfungsi untuk mengadministrasikan setoran penerimaan pada Satker BLU, baik yang dilakukan secara transfer manual maupun secara elektronik.

12. Modul Utang

Modul Utang dibuat dalam rangka menampung pencatatan utang pada Satker BLU yang memang sudah dilaksanakan namun belum ditatausahakan secara terpusat sistemnya.



Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

Alur Implementasi e-SKPP Fase II – PT Taspen (Persero): Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun Pertama dan/atau JHT





Dalam rangka pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT, KPA menerbitkan dan menyampaikan SKPP pensiun/berhenti ke KPPN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pegawai yang akan pensiun melaksanakan tugas.

Proses pengiriman data dukung dari satker ke PT Taspen (Persero) dapat dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses pengesahan SKPP Pensiun ke KPPN.

Selain menerbitkan SKPP pensiun/berhenti, KPA menyiapkan data dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun pertama dan/atau jaminan hari tua, yaitu antara lain:

1. data nomor induk kepegawaian (NIK) ,
2. data nomor pokok wajib pajak (NPWP),
3. data rekening, dan/ atau
4. data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, secara sistem menjadi bagian dari proses pengiriman data SKPP pensiun/berhenti ke PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

Proses pengiriman data SKPP pensiun/berhenti dan data dokumen pendukung kepada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) dilaksanakan secara elektronik dan terinterkoneksi antara aplikasi gaji modul KPPN dengan sistem pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

Pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua dilaksanakan secara langsung ke rekening pegawai dan dilaksanakan pada hari pertama atau hari kerja pertama bulan pegawai memasuki pensiun.

Tata cara pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua oleh PT. Taspen (Persero) atau PT. Asabri (Persero) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pembayaran pensiun dan jaminan hari tua.



MANFAAT

Manfaat dari *Quickwins* Sinergi Penguatan Layanan Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*)

Terbangunnya sistem aplikasi yang dapat berfungsi sebagai:

1. sinkronisasi data penyaluran yang terkoneksi dengan data penerima manfaat (*beneficiary registry*) dan pemberian penandaan bagi penerima manfaat bantuan sosial/bantuan pemerintah,
2. dapat menciptakan akselerasi dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia,
3. mengurangi terjadinya *inclusion* dan *exclusion error* dalam proses penyaluran bantuan sosial,
4. penyaluran bantuan sosial dapat sesuai kebutuhan penerima manfaat.

Optimalisasi Skema *Scheduled Payment Date* (SPD) melalui Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA)

Hasil kajian yang komprehensif yang dapat dijadikan rujukan mengenai desain transformasi digital proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan negara beserta optimalisasi kas negara di perbankan dalam mendukung kebijakan proses bisnis penyaluran pembayaran tagihan negara yang berisi terkait:

1. Gambaran mengenai mekanisme penyelesaian tagihan negara.
2. Gambaran mengenai pembayaran tagihan negara yang terjadwal (SPD).
3. Gambaran mengenai teknologi RPA, manfaat dan penggunaannya di berbagai industri.
4. Identifikasi dan analisis proses bisnis penyelesaian tagihan negara di KPPN.
5. Identifikasi potensi penerapan RPA dalam proses penelitian dan pengujian SPM di KPPN.
6. Analisis dan rumusan strategi penerapan RPA dalam proses penelitian dan pengujian SPM di KPPN.
7. Analisis keuntungan, kerugian, risiko, dan tantangan penerapan RPA dalam proses penelitian dan pengujian SPM di KPPN.

SAKTI BLU

Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian *fraud*. SAKTI BLU mendukung program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) melalui fitur PDN dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Interkoneksi SAKTI dengan sistem mitra penyedia jasa, perbankan, BUMN dan Kementerian/Lembaga telah mempercepat proses, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan BLU.

Aplikasi Integrasi Layanan Pembayaran Pensiun

1. Simplifikasi proses bisnis berupa penonaktifan *database* pegawai pada aplikasi gaji dan data *supplier* tipe pegawai pada SPAN melalui aplikasi gaji modul KPPN.
2. Otomasi pekerjaan berupa penonaktifan data pegawai dan data *supplier*, validasi gaji terakhir, informasi utang pegawai ke SAKTI modul pelaporan/piutang.
3. Otomasi pengiriman penerbitan, pengesahan, dan penyampaian SKPP secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan PT Taspen/PT Asabri.
4. Percepatan pembayaran pensiun pertama berupa relaksasi pembayaran uang makan, lembur, dan tunjangan kinerja.
5. Akuntabilitas pencatatan utang pegawai dengan memastikan utang tercatat di laporan keuangan.
6. Elektronifikasi dokumen dengan memanfaatkan tanda tangan secara elektronik dan aliran data informasi melalui sistem yang terinterkoneksi.
7. Pencegahan pembayaran gaji ganda dengan otomasi *cut off* pembayaran yang jelas untuk pegawai pindah dan pensiun.
8. Kemudahan administrasi layanan pensiun berupa pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT bagi ASN melalui aplikasi gaji yang bersifat *paperless* (tanpa *hardcopy*) dan berupa aliran data.
9. Ketepatan waktu pembayaran pensiun pertama dan/atau JHT pada tanggal 1 atau hari kerja pertama bulan PNS memasuki masa pensiun.



INTEGRASI PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA

UIC: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengenalkan asas baru sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan negara yang salah satunya adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi kinerja atau prestasi kerja. Informasi tersebut sebagai penghubung dengan laporan kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Hingga akhir 2023, data kinerja yang dikelola oleh pemerintah berupa informasi manajerial dalam rangka proses evaluasi kinerja anggaran (EKA) serta menjadi salah satu komponen indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), sehingga validasi atas informasi kinerja masih sangat terbatas dan kurang andal sebagai sumber data laporan terkait akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara. Permasalahan dalam pengelolaan kinerja pemerintah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, di mana sistem informasi dan pelaporan atas target dan realisasi capaian output program Prioritas Nasional dan Penanganan Covid19-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) belum sepenuhnya memadai untuk mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022, BPK kembali menegaskan rekomendasi terkait pengelolaan belanja yaitu memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output*, dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja.

Permasalahan pengelolaan kinerja Pemerintah juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sehingga dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 DPR memberikan rekomendasi kepada pemerintah antara lain :

- 01** Menyempurnakan regulasi untuk standardisasi keluaran (output) dan hasil (outcome) dari belanja negara dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBN dalam rangka mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.
- 02** Menyempurnakan sistem informasi dan basis satu data Indonesia yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran negara agar lebih tepat sasaran dan efektif mendukung pencapaian tujuan bernegara dalam mewujudkan masyarakat adil dan Makmur.
- 03** Menyampaikan laporan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan APBN dalam pengelolaan anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
- 04** Menyampaikan laporan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2022, yang ditunjukkan dengan indikator-indikator RPJMN yaitu baseline RPJMN (2019), capaian 2022, target 2024, dan K/L pelaksana.



Mengingat besarnya urgensi pelaporan keuangan dan kinerja dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara, digagaslah integrasi pelaporan keuangan dan kinerja yang memiliki pendekatan dari hilir yaitu pada saat kinerja sudah tercapai dan bagaimana kinerja seharusnya dilaporkan.

Integrasi ini juga merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar tercapai tujuan pembangunan nasional serta tujuan bernegara. Integrasi ini bersifat umum, yaitu informasi kinerja disampaikan dalam pelaporan keuangan dan sebaliknya informasi keuangan juga secara proporsional disampaikan dalam pelaporan kinerja. Oleh karena itu integrasi pelaporan keuangan dan kinerja dalam konteks ini merupakan proses untuk menjaga agar kinerja dilaporkan sejalan dengan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan tingkatannya.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) fase yang harus dilalui dalam menjalankan berbagai *action plan* untuk mewujudkan kondisi ideal integrasi pelaporan keuangan dan kinerja. Pada jangka pendek target yang ditetapkan ialah tersedianya informasi kinerja yang disandingkan dengan informasi anggaran dan realisasinya dengan memanfaatkan proses bisnis terkait perekaman data output sebagai sumber informasi IKPA.

Dalam rangka menindaklanjuti *action plan* jangka pendek tersebut, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan menginisiasi *Quickwin* Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja dalam bentuk penyediaan informasi kinerja dan keuangan, yang dapat diakses oleh beberapa *role* pengguna dalam upaya penyusunan laporan keuangan dan kinerja.

CAPAIAN

Proses pencapaian pelaksanaan *Quickwins* Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja dapat dilihat dari tercapainya *Acceptance Criteria* berupa tersedianya menu informasi kinerja pada sistem aplikasi terintegrasi sebagai basis dalam pengungkapan informasi kinerja dalam laporan keuangan. Dalam mencapai *Acceptance Criteria* dari *Quickwin* tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Tujuan dan Ruang Lingkup

Melakukan identifikasi tujuan dan ruang lingkup yang ingin dicapai dengan menentukan:

- Tujuan yang akan dicapai dalam mengembangkan informasi kinerja, sebelum akhirnya menentukan apa saja yang dipersiapkan.
- Menentukan ruang lingkup yang akan dicapai dalam pengembangan informasi kinerja.

2. Mengidentifikasi Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan dalam pengembangan aplikasi di mana sebenarnya penginputan capaian *output* sudah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan menjadi bagian dalam penilaian IKPA pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, *tagging data* sudah dilakukan oleh Direktorat Sistem Penganggaran, namun belum ditampilkan pada aplikasi MonSAKTI sehingga Kementerian/Lembaga dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, selaku pembuat Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sulit untuk mengidentifikasi data capaian *output*.

3. Menyusun *Change Request* (CR)

Menyusun *Change Request* (CR) pengembangan aplikasi MonSAKTI sebagai implementasi menyajikan data kinerja kepada seluruh pengampu laporan keuangan dan kinerja oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Yang dilanjutkan dengan kegiatan *User Acceptance Test* (UAT) oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.



4. Sosialisasi kepada Satuan Kerja

Dilaksanakan pertama kali sosialisasi kepada seluruh *stakeholder* dalam rangka rekonsiliasi capaian *output* untuk penyusunan laporan keuangan dan kinerja periode *unaudited* tahun 2023.

5. Implementasi Tahap I

Implementasi tahap I penggunaan *monitoring* kinerja satker dengan sistem yang terintegrasi oleh *user* dilakukan mulai dari bulan Februari 2024 saat penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja periode *unaudited* tahun 2023.

6. Evaluasi Implementasi Tahap I

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengevaluasi implementasi tahap I dari *monitoring* kinerja satker yang terdapat pada Aplikasi MonSAKTI serta tindak lanjutnya terkait pengembangan lanjutan/perbaikan. Kemudian dilakukan *User Acceptance Test* (UAT) kembali.

7 Finalisasi *Monitoring* Kinerja

Finalisasi *monitoring* kinerja satker pada Aplikasi MonSAKTI dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi capaian *output* dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja memerlukan koordinasi dan masukan dari berbagai pihak terkait *monitoring* kinerja satker. Pihak-pihak terkait perlu dilakukan sosialisasi atas pengembangan/perbaikan dari *monitoring* kinerja satker untuk kebutuhan pengungkapan capaian *output* pada laporan keuangan maupun laporan kinerja.

Meskipun integrasi pelaporan keuangan dan kinerja telah diselesaikan lebih cepat, namun dari hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya. Mengingat proses pengembangan integrasi pelaporan keuangan dan kinerja ke depannya akan lebih dinamis, salah satunya adalah pergantian Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat. Maka diperlukan pengembangan lebih lanjut terkait capaian.

Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja, merupakan upaya awal untuk memperbaiki tata

TEROBOSAN

kelola pengelolaan keuangan dan kinerja sesuai dengan kerangka kerja logis, sehingga dapat diukur efisiensi, efektivitas, serta relevansi antara penggunaan anggaran dan *output* yang dihasilkan dengan pencapaian *outcome*/sasaran yang telah ditetapkan pada fase perencanaan. Integrasi pelaporan bukan membuat dua laporan yang selama ini terpisah menjadi satu laporan, namun memastikan adanya informasi kinerja pada laporan keuangan dan informasi keuangan pada laporan kinerja. Adanya informasi kinerja dalam laporan keuangan diharapkan dapat menjadi *bridging* ke laporan kinerja, demikian sebaliknya.

Pengembangan informasi kinerja dalam *quickwin* ini dilakukan melalui aplikasi MonSAKTI dengan menampilkan seluruh informasi kinerja. Melalui pengembangan ini, diharapkan dapat memangkas waktu yang selama ini dilakukan melalui proses

pengumpulan data secara manual oleh K/L dan meningkatkan keakuratan data yang diperoleh.

Pada awal penerapan, Kementerian/Lembaga menggunakan *monitoring* kinerja satker sebagai alat untuk mengambil seluruh data kinerja. Seluruh data kinerja tersebut akan menjadi bahan dalam rekonsiliasi capaian output antara K/L, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Kemudian akan dibentuk nota kesepakatan sebagai bahan dalam pengungkapan capaian *output* untuk laporan keuangan.



PROSES BISNIS

Pada aplikasi MonSAKTI terkait Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja, terdapat beberapa pilihan untuk memfilter data tabulasi informasi kinerja berdasarkan jenis laporan, KPPN, Kementerian/Lembaga, unit eselon I, satker, dan periode. Tampilan akan menyesuaikan *role* Kementerian/Lembaga atau Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kementerian/Lembaga memiliki *role user* untuk melihat capaian kinerjanya sendiri, sedangkan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mendapatkan *role user* untuk melihat seluruh capaian kinerja K/L.

Monitoring Kinerja Satker

Masukkan informasi filter terlebih dahulu untuk melanjutkan.

JENIS LAPORAN **WAJIB**

KPPN

Pilih Jenis Laporan

Pilih KPPN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I

Pilih Kementerian/Lembaga

Pilih Eselon I

KODE SATKER

PERIODE **WAJIB**

Pilih Satker

Pilih Periode

ISILAH SEMUA KOLOM WAJIB SEBELUM MELANJUTKAN.



Dapat dijelaskan secara singkat fungsi dari masing-masing fitur/menu di atas antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Laporan

Fitur ini digunakan untuk melakukan *monitoring* kinerja sesuai dengan jenis laporan karena merupakan pilihan wajib dalam *monitoring*, seperti Kinerja (menampilkan *tagging-tagging* terkait kinerja), Tematik (menampilkan data kinerja sesuai dengan referensi RO Tematik), Prioritas Nasional (menampilkan data kinerja sesuai dengan referensi RO Prioritas Nasional), Program Prioritas (menampilkan data kinerja bagian dari Prioritas Nasional), Kegiatan Prioritas (menampilkan data kinerja bagian dari Program Prioritas), Proyek Prioritas (menampilkan data kinerja bagian dari Kegiatan Prioritas), dan *Major Project* (menampilkan data kinerja sesuai dengan referensi RO *Major Project*).

2. KPPN

Fitur ini digunakan untuk melakukan *monitoring* kinerja dengan menampilkan pilihan jenis laporan data kinerja sesuai KPPN.

3. Kementerian/Lembaga (K/L)

Fitur ini digunakan untuk melakukan *monitoring* kinerja dengan menampilkan pilihan jenis laporan data kinerja sesuai K/L.

4. Unit Eselon I

Fitur ini digunakan untuk melakukan *monitoring* kinerja dengan menampilkan pilihan jenis laporan data kinerja sesuai Unit Eselon I.

5. Satker

Fitur ini digunakan untuk melakukan *monitoring* kinerja dengan menampilkan pilihan jenis laporan data kinerja sesuai satker.

6. Periode

Fitur ini digunakan untuk memilih periode pada setiap pilihan filter *monitoring* kinerja satker karena merupakan pilihan wajib.



MANFAAT

Manfaat *Quickwins* Integrasi Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja sudah mulai terasa pada proses rekonsiliasi capaian *output* dalam Laporan Keuangan *Unaudited* 2023 di bulan Februari 2024. Berdasarkan data pada menu ini juga ditemukan beberapa hal yang harus diperbaiki pemerintah seperti adanya anomali pada realisasi volume rincian *output* (RVRO) yang selama ini belum masuk dalam validasi kualitas data RO, sehingga pada Desember 2024, hal ini ditindaklanjuti Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan menerbitkan petunjuk teknis tentang validasi data realisasi capaian *output*.

Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal. Tampilan pada *Monitoring* Kinerja Satker berupa tabulasi informasi kinerja (*unverified*) yang dapat menjadi alat bantu bagi satker, unit organisasi, K/L, dan entitas lain di pemerintah pusat yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk menyusun laporan yang menjadi mandatori tersebut.

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KINERJA DAN KEUANGAN *GENERALIZED*

UIC: Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

LATAR BELAKANG

Belum adanya aplikasi manajerial pendukung terhadap proses bisnis tagihan ditengah kebutuhan *load* transaksi yang cukup tinggi dan melibatkan banyak pihak. Awalnya aplikasi SIPKK dibuat secara khusus memenuhi kebutuhan Satker Kantor Pusat DJPb sejak tahun 2014, namun seiring waktu terdapat kebutuhan dari Satker PPP BUN, Satker Kanwil Papua, dan Satker Induk dan Layanan untuk bisa menggunakan SIPKK.

Adapun beberapa alasan yang mendasari untuk segera perlu mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan (SIPKK) *Generalized* yaitu:



Aplikasi SIPKK adalah aplikasi pendukung penyelesaian tagihan atau pra SPP sebelum SAKTI. SIPKK-*Generalized* merupakan pengembangan lebih lanjut aplikasi SiPKK yang selama ini hanya digunakan oleh Satker Kantor Pusat. SiPKK-G atau SiPKK *Generalized* yang nantinya akan diimplementasikan bagi Satker Kantor Pusat, Satker PPP BUN, BPP dan Satker Kantor Vertikal.



CAPAIAN

Proses pencapaian hasil atas pelaksanaan Quickwins Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan (SIPKK) *Generalized* dapat dilihat dari tercapainya *Acceptance Criteria* berupa:

1. **Rumusan langkah dan tahapan teknis pelaksanaan**
2. **Software requirements specification (SRS)**
3. **Interkoneksi API service**
4. **Developing SIPKK-G**
5. **Testing (UAT, FIT dan QA)**

Dalam mencapai *Acceptance Criteria* dari Quickwin tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. **Rumusan Langkah dan Tahapan Teknis Pelaksanaan**
Kegiatan rumusan langkah dan tahapan teknis sudah selesai dilaksanakan di bulan Januari.
2. **Software Requirements Specification (SRS)**
Kegiatan SRS dilaksanakan di bulan Maret.
3. **Interkoneksi API Service**
Rapat Interkoneksi API service di bulan April dengan Dit. SITP dan Pusintek.

4. **Developing dan Testing (UAT, FIT dan QA) SIPKK Modul Tagihan**

Pelaksanaan *End User Test* (EUT) Aplikasi SIPKK-*Generalized* Khusus Modul Tagihan TA 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14-17 Mei 2024, dengan peserta Satker P3BUN. *Roll out* modul tagihan untuk Satker P3BUN pada bulan Mei 2024

5. **Developing dan Testing (UAT, FIT dan QA) SIPKK Modul Konsumsi dan Honorarium**

Proses *Developing* dan *Testing* SIPKK modul konsumsi dan honorarium selesai dilaksanakan pada bulan September.

6. **Developing dan Testing Interkoneksi Aplikasi SIPKK-G dan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas**

E-Perjadin versi 2 mulai UAT tgl 11-12 Juli 2024. Pada bulan Oktober telah disampaikan

nota dinas dari Sesditjen (ND-4457/PB.1/2024 tanggal 30 Oktober 2024) terkait Permintaan Interkoneksi Aplikasi SIPKK-*Generalized* dan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas kepada Dit SP dan tembusan Pusintek. Selanjutnya di bulan November, dari Pusintek telah memberikan akses API interkoneksi data dan dokumen dari e-Perjadin ke aplikasi SIPKK.

7. **Developing dan Testing (UAT, FIT dan QA) SIPKK Modul Perpajakan**

Proses *Developing* dan *Testing* SIPKK modul Perpajakan selesai dilaksanakan pada bulan Desember.

TEROBOSAN

Aplikasi SiPKK-G ini adalah pengembangan lebih lanjut aplikasi SiPKK yang selama ini hanya digunakan oleh Satker Kantor Pusat, yang nantinya akan diimplementasikan bagi Satker Kantor Pusat, Satker PPP BUN, BPP, dan Satker Kantor Vertikal.

Tujuan dari pengembangan SiPKK-G yaitu:

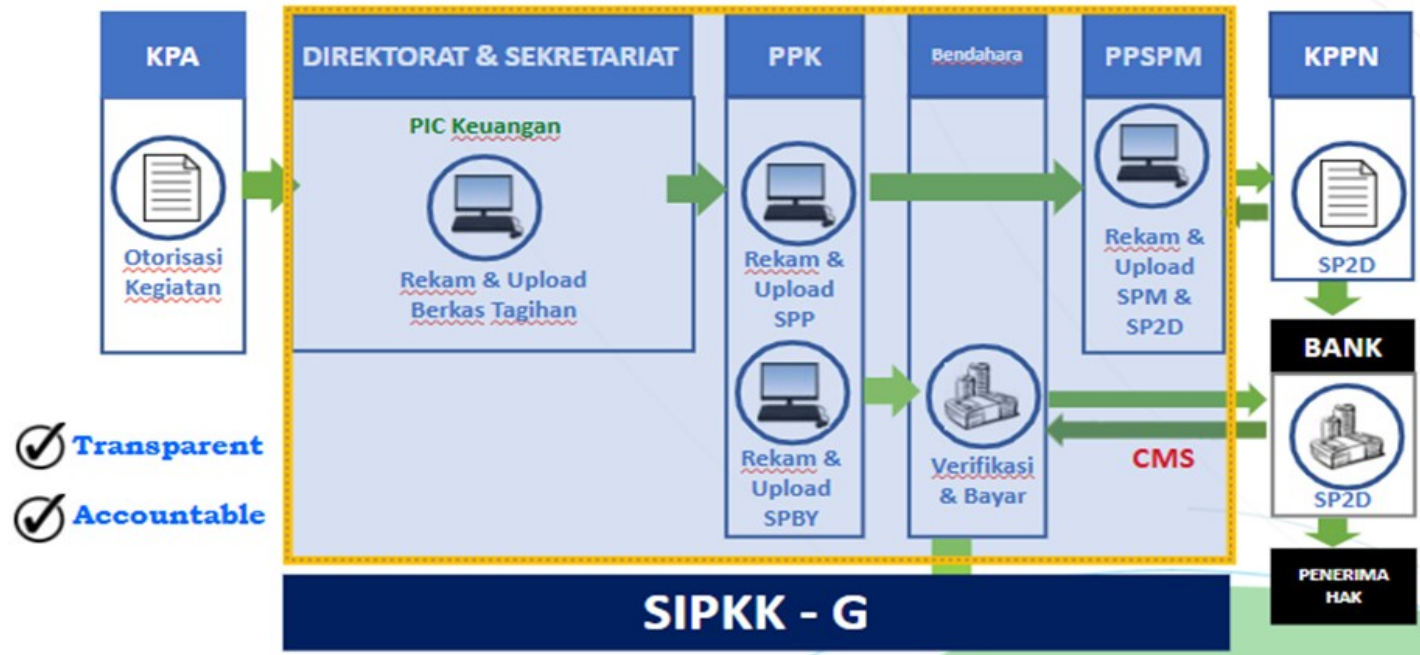
1. Menyediakan *tools* pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan realisasi belanja;
2. Implementasi *Service Level Agreement* (SLA) setiap tahapan penyelesaian tagihan;
3. Sinkronisasi proses bisnis modul perjalanan dinas dengan e-Perjadin; dan
4. Pengukuran dan pengendalian akurasi atas alokasi dan realisasi anggaran berbanding dengan capaian kinerja.



PROSES BISNIS



Skema SiPKK -Generalized



Pada Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja Keuangan (SiPKK) *Generalized* terdapat beberapa modul, yaitu:

1. Manual Pendaftaran

Manual ini berisi tata cara pendaftaran user

Digit dan user SiPKK, yang terdiri dari:

- Pendaftaran User Digit
- Pendaftaran User SiPKK

MANFAAT

2. Modul Admin

Modul berisi tata cara pendaftaran dan penggunaan admin, yang terdiri dari:

- Aktivasi User SIPKK
- Perekaman *Roles*, Pembebanan, dan Relasi PPK
- Perekaman Data Pegawai
- Konfigurasi Kota Penandatangan

3. Modul Tagihan

Modul inti dari Aplikasi SiPKK- *Generalized* yang berfungsi mengatur proses bisnis pembayaran tagihan, yang terdiri dari:

- Tagihan UP/TUP/LS
- Tagihan GUP/GUP Nihil/PTUP
- Tagihan Honorarium dan Perjadin

4. Modul Honor Tim

Modul untuk pembayaran berkas tagihan dengan jenis Pembayaran Honorarium Tim, yang terdiri dari:

- Perekaman SK Tim
- Perekaman Daftar Nominatif Honorarium Tim

Manfaat SIPKK-G

- Memberikan informasi manajerial yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan secara *real time* melalui menu dashboard aplikasi dan/atau pengolahan database yang dapat dikonversi dalam format excel.
- Mempermudah proses pengarsipan dokumen pelaksanaan anggaran melalui proses pengarsipan elektronik dan memudahkan tracing dokumen untuk pemeriksaan Itjen dan BPK.
- Pengawasan norma waktu penyelesaian tagihan negara sesuai dengan ketentuan PMK 62 Tahun 2023, sehingga dapat diketahui posisi, durasi waktu, dan permasalahan keterlambatan dokumen pembayaran.
- Menghindari duplikasi pembayaran perjalanan dinas dalam negeri, pembayaran honor tim melebihi batas maksimal yang diatur dalam SBM.



PENGEMBANGAN ANOMALY DETECTION DALAM TAGIHAN PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

UIC: Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan serta Direktorat Sistem Perbendaharaan

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan perubahan besar (*disrupsi*) dalam cara kerja organisasi. Berbagai kemajuan teknologi terkini menjadikan hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mungkin, membuat sebuah pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih efisien, dan memungkinkan berbagai variasi data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis lebih mendalam. Kemampuan teknologi-teknologi terkini berdampak terhadap perubahan standar layanan yang disediakan organisasi. Tantangan disrupsi dan perubahan permintaan layanan yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi tersebut juga dihadapi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Negara, DJPb memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas layanan

pemerintahan melalui transformasi digital sistem perbendaharaan. Sistem pembayaran elektronik yang merupakan salah satu bentuk digitalisasi sistem perbendaharaan, dapat mempermudah proses administrasi dan pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Sistem pembayaran elektronik memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) menjadi salah satu infrastruktur kunci dalam menyediakan layanan pembayaran yang efisien dan terpercaya bagi masyarakat. PPP sendiri merupakan integrasi/interkoneksi sistem antara *Core System* dengan Sistem Pendukung, Sistem Mitra, dan Sistem Monitoring dengan tujuan pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dan diakses oleh pejabat yang berwenang dari berbagai kanal pembayaran yang memungkinkan. Integrasi ini mencakup berbagai komponen yang



bekerja sama untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan aman.

Seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya sistem pembayaran elektronik ini juga membawa risiko keamanan, terutama dalam hal potensi *fraud* atau kecurangan. Platform Pembayaran Pemerintah menangani volume transaksi yang tinggi, risiko munculnya anomali, seperti kesalahan entri data atau transaksi mencurigakan, menjadi salah satu tantangan. Anomali yang tidak terdeteksi dapat 3 menyebabkan ketidakefisiensian atau kebocoran anggaran, yang pada akhirnya berdampak negatif pada operasional keuangan pemerintah. Sebagai upaya untuk menjaga integritas dan akurasi dalam proses pembayaran, pengembangan sistem untuk mendeteksi anomali menjadi penting.

Anomaly Detection System dikembangkan sebagai salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan, yang mungkin merupakan tanda adanya kecurangan atau pelanggaran. Dengan adanya *anomaly detection system*, kita dapat lebih cepat mengidentifikasi transaksi yang tidak sesuai dengan pola normal atau standar yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan lapisan keamanan tambahan yang diperlukan dalam mengelola data keuangan, terutama dalam hal mencegah kesalahan yang dapat berujung pada potensi kerugian keuangan, sehingga akhirnya juga berdampak pada meningkatkan kepercayaan *user* terhadap sistem pembayaran elektronik.



CAPAIAN

Proses pencapaian hasil atas pelaksanaan *Quickwin* Pengembangan *Anomaly Detection* dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) dapat dilihat dari tercapainya *Acceptance Criteria* berupa tersedianya sistem *anomaly detection* yang dapat membantu pemerintah dalam mengelola dananya dengan lebih baik dan tepat guna untuk beberapa platform pembayaran pemerintah, khususnya untuk pembayaran PLN dan Telkom. Dalam mencapai *Acceptance Criteria* dari *Quickwin* tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem

Kegiatan ini melibatkan identifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan keseluruhan untuk pengembangan *Anomaly Detection System*. Proses ini mencakup pengumpulan persyaratan dari pemilik proses bisnis/pengguna dan perencanaan teknis untuk memastikan semua kebutuhan diakomodasi dalam desain sistem.

2. *Business and Data Understanding*

Pada tahap ini, dilakukan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis dan data yang digunakan dalam sistem pembayaran pemerintah. Analisis data melibatkan pemeriksaan struktur data, sumber data, dan pola transaksi yang ada untuk memahami karakteristik data yang akan dianalisis.

3. Perancangan Arsitektur Teknis dan Fungsional

Perancangan arsitektur teknis dan fungsional sistem dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan teknis dan fungsional dapat terpenuhi. Ini mencakup desain arsitektur sistem, spesifikasi teknis, dan *blueprint* rencana pengembangan yang akan digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem.

4. Penggunaan Data dari *Environment Treasury Big Data*

Penggunaan data yang diperlukan dalam rangka untuk analisis dan pengembangan model. Data yang digunakan merupakan



data transaksi pembayaran yang dikumpulkan dan disimpan dalam *Environment Treasury Big Data*.

5. Pengembangan Algoritma dan Model *Anomaly Detection*

Pada tahap ini, algoritma dan model untuk *anomaly detection* dikembangkan. Pengembangan ini memanfaatkan teknik-teknik *machine learning* dan *data mining* untuk membuat model yang mampu mendeteksi pola-pola anomali dalam data transaksi pembayaran.

6. Uji Coba Sistem dan Evaluasi Model

Sistem dan model yang dikembangkan dilakukan uji coba dan evaluasi untuk memastikan efektivitas dan akurasi dalam mendeteksi anomali yang mungkin terjadi. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi uji coba sistem untuk mengidentifikasi serta memvalidasi hasil dari pengembangan *anomaly detection system* dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan dan berguna bagi pengguna.

7. Deployment Model *Anomaly Detection*

Hasil dari pengembangan model *anomaly detection* akan di-*deploy* ke dalam sistem yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur
Menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk *deployment*, termasuk *server*, *database*, dan jaringan.
- b. *Deployment Model*
Mengimplementasikan model deteksi *anomaly* ke dalam sistem pembayaran pemerintah, serta melakukan konfigurasi dan pengaturan diperlukan.

Setelah seluruh tahapan kegiatan pengembangan dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah penyampaian rilis dan sosialisasi penggunaan platform *Anomaly Detection* dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) kepada pemilik proses bisnis, Kanwil DJPb dan KPPN, yang selanjutnya dapat menyampaikan kepada seluruh satker di wilayah kerjanya masing-masing.



TEROBOSAN

Pengembangan *Anomaly Detection System* ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian, ketidakwajaran, dan inefisiensi pada pembayaran pemerintah.

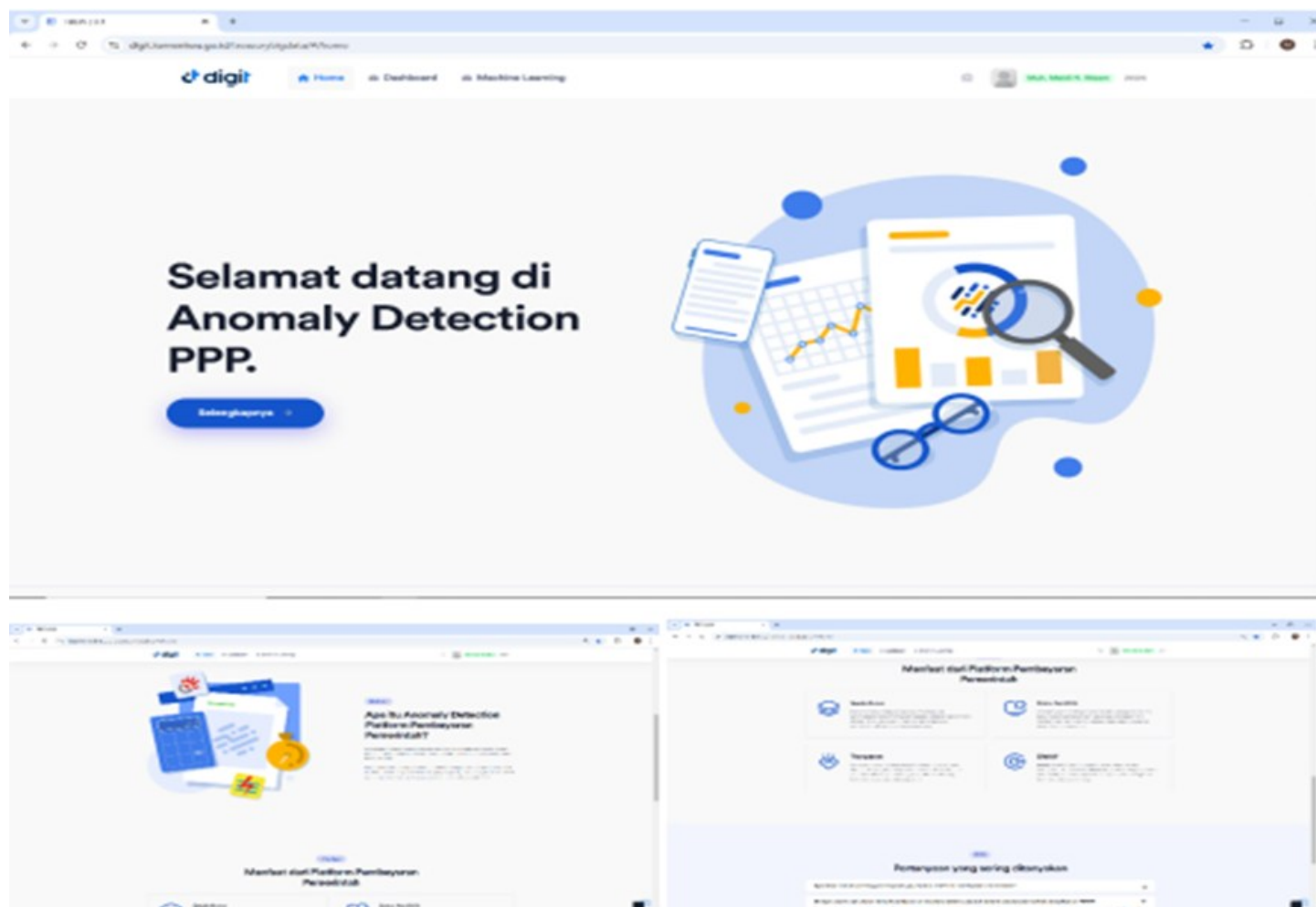
Pada tahap awal, analisis difokuskan pada data pembayaran untuk tagihan *common expense* (PLN dan Telkom). Sistem ini menghasilkan keluaran berupa *dashboard* analitik serta platform simulasi yang memberikan gambaran terhadap pola transaksi yang mencurigakan. Dashboard analitik memungkinkan pengguna untuk memantau dan menganalisis indikasi anomali, sementara platform simulasi menyediakan model interaktif yang mendukung penggalian data lebih mendalam, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan

fleksibilitas pada platform simulasi, pengguna dapat menjalankan simulasi sendiri, mengubah parameter, dan mengamati dampaknya secara langsung untuk menganalisis risiko yang mungkin muncul.

Selain mendukung pengambilan keputusan berbasis data, sistem ini dirancang agar menjadi alat bantu bagi *user* dalam mencegah potensi kerugian finansial. Melalui simulasi berbasis model ini, pengambil keputusan dapat memetakan risiko ketidaksesuaian, ketidakwajaran, dan inefisiensi yang berpotensi terjadi dalam proses pembayaran, sehingga memungkinkan mereka untuk merespon dengan kebijakan mitigasi yang tepat. Dengan kata lain, *Anomaly Detection System* ini berfungsi sebagai langkah mitigatif yang mampu membantu untuk mengalokasikan dana secara lebih efisien dan tepat guna, serta menjaga integritas dalam proses pengelolaan pembayaran elektronik.



PROSES BISNIS





Alur penggunaan *Anomaly Detection System* dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah, yaitu:

1. Pengguna mengakses Digit Modul TBD
2. Pada bagian atas terdapat menu '*Machine Learning*'
3. Pilih sub-menu '*Anomaly Detection* Pembayaran PLN Telkom'
4. Pilih filter Periode (Periode Awal dan Akhir) dan Jenis Transaksi
5. Maka akan muncul tampilan untuk Monitoring *Anomaly Detection* PPP

Panduan akses platform "*Anomaly Detection System*" dalam Tagihan Platform Pembayaran Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Login

- a. Buka *browser* kemudian buka aplikasi DIGIT pada tautan <https://digit.kemenkeu.go.id/treasurybigdata/>
- b. Klik pada tombol "Login DIGIT" pada bagian atas halaman.
- c. Masukkan NIP/NIK/Username dan Password.
- d. User akan masuk ke *landing page* Treasury Big Data.
- e. Apabila telah berhasil masuk ke *landing*

page Treasury Big Data, maka akan muncul modul yang telah di-assign dan/atau dapat mengakses melalui Konfigurasi Modul untuk Platform *Anomaly Detection* Pembayaran Tagihan PPP.

2. Setting Konfigurasi

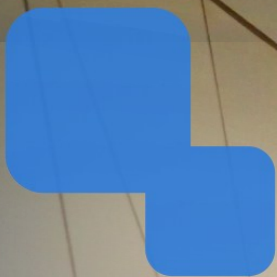
- a. Pada pojok kanan atas halaman terdapat nama *user*, silakan arahkan kursor ke nama *user*. Selanjutnya pilih menu "Konfigurasi Modul".
- b. Pada halaman konfigurasi modul, klik "Pilih Modul".
- c. Pilih modul yang ingin ditampilkan, dalam hal ini *user* silakan untuk memilih modul "PPP", klik "Simpan".
- d. User akan diarahkan ke halaman Platform *Anomaly Detection* Pembayaran Tagihan PPP.

3. Menu dan Fitur

- a. Platform *Anomaly Detection* Pembayaran Tagihan PPP terdiri dari 3 menu: *Home*, *Dashboard*, dan *Machine Learning*.
- b. Untuk menampilkan *Anomaly Detection* Pembayaran Tagihan PPP (Telkom dan PLN) dapat diakses melalui menu



- “Machine Learning”* dan tampilan akan dapat menyesuaikan dengan kewenangan *user* atau sesuai dengan satker pada unit kerjanya masing-masing.
- c. Sebelum dapat menampilkan Data Hasil Analisis *Anomaly Detection*, *user* harus terlebih dahulu memilih filter dengan klik pada tombol, masukkan Periode, Jenis Transaksi, dan Satker yang ingin ditampilkan kemudian klik tombol *“Load”*.
 - d. Maka akan muncul tampilan sesuai dengan Periode, Jenis Transaksi, dan Satker yang sudah dipilih tadi, pada bagian kanan atas juga bisa dilakukan *“Search”* untuk mencari ID atau Nama Pelanggan sesuai dengan yang diinginkan.
 - e. Pada bagian kiri atas *user* juga dapat mengunduh tabel data sesuai dengan filter dan tampilan yang sudah dipilih sebelumnya. Data yang ingin diunduh dapat dijadikan menjadi format CSV, Excel, PDF, dan juga dapat dicetak secara langsung.
 - f. Kemudian *user* juga dapat mengakses *Dashboard Monitoring* PPP melalui Menu *“Dashboard”* dan tampilan juga akan dapat menyesuaikan dengan kewenangan *user* atau sesuai dengan satker pada unit kerjanya masing-masing.
 - g. Pada *Dashboard Monitoring* PPP terdapat tab *“Home”* yang berisi terkait dengan penjelasan dan informasi terkait dengan *Dashboard* tersebut. *List* Satker terdiri dari Nama Kanwil, KPPN, Kode dan Nama Satker yang tersedia dalam *Monitoring*.
 - h. Pada tab *“Common Expenses”* menampilkan data terkait Informasi Umum Pembayaran Tagihan PPP, Sebaran Wilayah (*Map*) Pembayaran Tagihan, SebaranID dan Tagihan, Nilai Tagihan PerBulan (*Time series*), Tren Tagihan, serta Nilai Prediksi (*Forecast*) Pembayaran.
 - i. Pada bagian kiri atas tampilan *Dashboard Analisis Tagihan user* dapat melakukan klik pada tombol *“menu”* untuk membuka dan menampilkan Menu *Common Expenses* dan *Dashboard* terkait lainnya.



Feeder Kereta Api Cepat
High-speed Rail Feeder Line



Peron
Platforms

6-7



KA Jarak Jauh
Intercity Trains



B C **KA Jarak Jauh** **Peron** **4-5**

B **Keluar KA Jarak Jauh/KA Lokal**
Exit for Intercity and Local Trains

6 **KA Jarak Jauh** **Peron** **2-3**

B **Keluar KA Jarak Jauh/KA Lokal**
Exit for Intercity and Local Trains

Informasi Kereta Api
Train Information

4 **KA Jarak Jauh** **Peron** **2-3**

B **Keluar KA Jarak Jauh/KA Lokal**
Exit for Intercity and Local Trains

04

Seamless Connectivity

Konektivitas antarmoda menjadikan perjalanan lebih ringkas, penumpang dapat berpindah antarmoda transportasi tanpa hambatan. Integrasi ini menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih simpel, efisien, dan terhubung dalam satu ekosistem.

Semangat yang sama tercermin dalam transformasi perbendaharaan negara yang senantiasa meningkatkan layanan, salah satunya melalui interkoneksi antar sistem. Interkoneksi sistem mewujudkan proses bisnis perbendaharaan yang lebih simpel namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.



KEGIATAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN TAHUN 2024

PEMBINAAN DUTA TRANSFORMASI

1. GAMBARAN UMUM DUTA TRANSFORMASI

Duta Transformasi merupakan penerapan konsep *change leaders* sebagai pendukung utama manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Duta Transformasi merupakan *collaborative team* yang terdiri dari *Change Champion*, *Change Agent*, dan *Lighthouse Team* yang mewakili Unit Organisasi Eselon II dan Unit Organisasi non Eselon, termasuk Badan Layanan Umum dan *Special Mission Vehicles* untuk menjaga kesinambungan implementasi program dan inisiatif strategis serta mendukung manajemen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Duta Transformasi ditetapkan setiap tahunnya melalui Keputusan Menteri Keuangan, pada Tahun 2024 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 210 Tahun 2024 tentang Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2024.

Tujuan utama program Duta Transformasi adalah sebagai perpanjangan tangan pimpinan Kementerian Keuangan dalam:

1. Memastikan kesamaan persepsi
2. Percepatan internalisasi, dan

3. Menggali aspirasi atas inisiatif strategis terhadap seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Tugas Duta Transformasi:

1. Melaksanakan dan melaporkan program kerja Duta Transformasi serta aktif mendukung pelaksanaan program, isu, dan inisiatif strategis Kementerian Keuangan.
2. Menjadi penghubung antara CTO dan PMO dengan pegawai unit masing-masing dalam menyampaikan pesan perubahan.
3. Mengumpulkan *feedback* atas implementasi program, isu, dan inisiatif strategis dari unit serta pemangku kepentingan untuk disampaikan ke PMO.
4. Menjadi panutan (*role model*) dalam:
 - a. Inisiatif perbaikan proses bisnis dan peningkatan layanan, serta
 - b. Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan, kode etik dan kode perilaku Pegawai Negeri Sipil, dan penguatan budaya di lingkungan Kementerian Keuangan.

2. INTIMACY DUTA TRANSFORMASI

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan keberhasilan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui *Project Management Office* (PMO) DJPb telah menyelenggarakan Kegiatan *Intimacy* Duta Transformasi Kelembagaan Tahun 2024.



Adapun *Intimacy* Duta Transformasi adalah agenda rutin yang dilaksanakan oleh PMO DJPb dalam rangka internalisasi kepada Duta Transformasi Kelembagaan yang baru serta bertujuan untuk memberikan pemahaman mendasar mengenai Transformasi Kelembagaan, peran serta tugas Duta Transformasi, dan strategi komunikasi perubahan, khususnya bagi para pegawai yang baru ditunjuk sebagai Duta Transformasi Kelembagaan pada tahun 2024. Duta Transformasi DJPb Tahun 2023 sendiri terdiri dari 42 *Change Agent* dan 232 *Lighthouse Team*, yang memiliki tugas melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan Pusat.

Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 29 Februari 2024, secara daring melalui *Teams Meeting* (218 peserta) dan aplikasi YouTube (25 peserta), dengan mengangkat tema "Agak Laen Mengomunikasikan Perubahan". Beberapa poin penting disampaikan oleh narasumber ahli, antara lain:

1. **Peran Duta Transformasi:** Duta Transformasi, yang terdiri dari *Change Agent* dan *Lighthouse Team*, merupakan ujung tombak keberhasilan implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Mereka diharapkan menjadi inspirasi positif yang mendorong transformasi dalam budaya, proses, dan rencana strategi organisasi.
2. **Perkembangan Inisiatif Strategis dan Quickwins DJPb:** Kepala Subdirektorat Transformasi



Kelembagaan, selaku Ketua Harian PMO DJPb, Bapak Achmad Rinaldi Hidayat, menyampaikan gambaran Transformasi Kelembagaan serta inisiatif strategis dan *quickwins* yang akan dilaksanakan DJPb pada tahun 2024.

3. **Komunikasi Lintas Generasi:** Pentingnya memahami karakteristik setiap generasi untuk membangun komunikasi yang efektif dalam tim yang baru dibentuk atau lintas generasi. Hipnoterapi dapat digunakan untuk mempengaruhi cara pemikiran dan pembelajaran, membantu membangun karakter yang lebih baik.

4. Tips Menjadi Duta Transformasi yang Efektif:

- a. **Belajar dan Pahami:** Berlatih dan memahami apa yang akan disampaikan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri.
- b. **Berani Mencoba:** Jangan takut untuk mencoba meskipun hasilnya belum sempurna, karena ini adalah cara untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki.
- c. **Kolaborasi:** Lakukan kolaborasi untuk menghadapi tantangan terkait kemampuan, pengetahuan, dan waktu.
- d. **Membangun Keterlibatan (*Engagement*):** Kenali audiens dan sampaikan hal-hal positif yang relevan dengan mereka terhadap program yang dilakukan.
- e. **Konsistensi:** Perbedaan antara orang luar biasa dan orang biasa terletak pada konsistensi kebiasaan. Kemajuan mustahil tanpa perubahan.

Kegiatan *Intimacy* Duta Transformasi Kelembagaan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan lancar. Acara ini

berhasil memberikan pemahaman mendasar mengenai Transformasi Kelembagaan serta membekali para Duta Transformasi dengan strategi untuk mengomunikasikan perubahan secara efektif. Partisipasi aktif dari peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Diharapkan kegiatan semacam ini dapat diselenggarakan secara periodik untuk memperkuat silaturahmi, menjadi media pembelajaran, dan menyebarkan informasi bagi para Duta Transformasi Kelembagaan di masa mendatang.

3. CLASS OF DUTA TRANSFORMASI

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui *Project Management Office* (PMO) DJPb secara periodik menyelenggarakan kegiatan *Class of Duta* (CoD) Transformasi Kelembagaan sebagai strategi *Change Management and Communication* bagi para Duta Transformasi Kelembagaan. COD merupakan agenda *workshop* tematik dengan *Professional* yang dilaksanakan oleh PMO DJPb. Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja Duta Transformasi Tahun 2024 yang telah ditetapkan CTO Kemenkeu. Pada tahun 2024, kegiatan CoD dilaksanakan dalam dua seri utama untuk memperkuat kapasitas mereka.

Seri pertama, bertema "*Embracing Change: Being Adaptive, Collaborative, and Inovative*", dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 secara daring melalui *Teams Meeting* dan kanal YouTube PMO DJPb. Kegiatan ini diikuti oleh 329 peserta melalui *Teams Meeting* dan 180 *views* melalui *YouTube*, mencakup seluruh Duta Transformasi Kelembagaan DJPb, Pejabat Eselon II, perwakilan *Central Transformation Office*, dan Duta Transformasi Unit Eselon I lainnya. Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka kegiatan ini dengan



menekankan pentingnya *mindset* positif dalam menyambut perubahan, serta komitmen bersama dari seluruh *stakeholder* untuk keberhasilan transformasi. Materi diskusi berfokus pada isu-isu strategis seperti Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah dan Jabatan Fungsional Konsolidasi. Tujuan seri ini adalah untuk meningkatkan kapasitas *soft skill* Duta Transformasi sebagai *role model* dan mengoptimalkan peran mereka dalam melakukan *change management* terkait dinamika organisasi DJPb, sebagai tindak lanjut hasil Survei MOFIN Tahun 2023.

Seri kedua, bertema "*Impact Management: Make Impactful Changes*", dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 secara *hybrid* di Ruang Rapat Handal Lantai 4 Direktorat Sistem Perbendaharaan dan Microsoft Teams. Kegiatan ini diikuti oleh 274 Duta Transformasi Kelembagaan DJPb, baik yang hadir secara luring maupun daring. Direktur Sistem Perbendaharaan pada pembukaan seri ini mendorong Duta sebagai agen perubahan untuk menciptakan perubahan yang berdampak, mengembangkan budaya yang merangkul perubahan, serta menghasilkan laporan proyek perubahan yang berkualitas. Materi diskusi berfokus pada *Executive Summary Proposal* Proyek Perubahan Duta Transformasi 2024 dan Optimalisasi Penyusunan Laporan Proyek Perubahan Duta Transformasi 2024.





Tujuan utama seri kedua ini adalah untuk mengoptimalkan penyusunan laporan proyek perubahan oleh Duta Transformasi DJPb yang akan dikumpulkan pada awal Oktober, serta meningkatkan kapasitas *soft skill* kepemimpinan dalam tim untuk menjadi *role model* yang adaptif dan inovatif.

4. PRESTASI DUTA TRANSFORMASI DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah secara resmi menyampaikan hasil penetapan Duta Transformasi Terbaik Kementerian Keuangan dan Duta Transformasi Terbaik Tingkat Unit Organisasi Eselon I DJPb Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM.1/2025. Penetapan ini merupakan puncak dari serangkaian pembinaan, pemantauan, dan penilaian yang dilakukan oleh *Project Management Office* (PMO) DJPb dan *Central Transformation Office* (CTO) terhadap pelaksanaan tugas Duta Transformasi.

Para Duta Transformasi mengemban tugas penting untuk melaksanakan Program Kerja Duta Transformasi serta melaporkan perkembangan dan penyelesaiannya di unit kerja masing-masing. Penilaian didasarkan pada capaian realisasi frekuensi, kesesuaian, dan signifikansi dampak dari program kerja yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024. Capaian program kerja Duta Transformasi DJPb Triwulan IV Tahun 2024 menjadi data dukung utama dalam penilaian Indikator Kinerja

Individu (IKI) Duta Transformasi. Proses validasi dan penilaian kualitas oleh CTO, ditambah dengan rekomendasi dari Program Kerja Khusus, akhirnya menghasilkan 10 Duta Transformasi Terbaik Tahun 2024. Adapun beberapa kantor vertikal DJPb berhasil meraih predikat Duta Transformasi terbaik Kementerian Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Duta Transformasi Terbaik Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2024:
 - Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu
 - Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
2. Duta Transformasi Terbaik Tingkat Unit Organisasi Eselon I DJPb Tahun 2024:
 - Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
 - Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
 - Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Barat

DJPb menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Duta Transformasi DJPb Tahun 2024, khususnya kepada para Duta Transformasi Terbaik, atas kontribusi, partisipasi, sinergi, dan dedikasi mereka dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan. Penetapan ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruh Duta Transformasi untuk terus mengembangkan potensi dan prestasi di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPb.



PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. BENCHMARKING CMC TELKOM

Dalam upaya akselerasi *Treasury Modernization* dan perluasan layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan *Benchmarking Change Management and Communication* di Telkom Corporate University pada tanggal 3-5 Juni 2024 di Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi komunikasi dan manajemen perubahan dalam rangka mendukung implementasi *piloting* pembayaran belanja listrik dan telekomunikasi melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

Acara dibuka oleh *Deputy Senior General Manager Telkom Corporate University*, Wibisana Jaka, diikuti sesi utama bertema "*Increasing Organization Capability through Knowledge Management*" oleh *Tribe Leader Knowledge Management*, Wahyu Winarto. Materi mencakup konsep *fundamental knowledge management*, metodologi implementasi, dan studi kasus penerapan yang berhasil meningkatkan kapabilitas organisasi di lingkungan Telkom Group, termasuk *framework* pengukuran efektivitas dan strategi *sustainability*.

Tim DJPb juga mengunjungi *Innovation Center* Telkom-ITDRI untuk mempelajari berbagai solusi inovatif, mulai dari *myDigiLearn* sebagai *platform corporate learning multi-channel*, *BigBox* sebagai solusi *Big Data Analytics*, *Ideabox* sebagai platform inovasi kolaboratif, serta ITDRI Studio Podcast sebagai fasilitas produksi konten audio-visual. Keseluruhan inovasi ini mendemonstrasikan pendekatan holistik dalam *digital transformation* yang

dapat diadaptasi untuk memperkuat *capacity building dan communication effectiveness* di sektor pemerintahan.

Hasil *benchmarking* mengidentifikasi *key success*



factors dalam implementasi *change management* di Telkom, termasuk *technology-driven communication channels*, *data-based monitoring system*, *systematic stakeholder engagement*, dan *integration of feedback mechanisms*. Temuan ini memberikan *blueprint* untuk



pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif di lingkungan DJPb, dengan tindak lanjut berupa penyusunan strategi komunikasi komprehensif untuk piloting PPP dan pelaksanaan *podcast series* dengan pimpinan Unit Eselon II Ditjen Perbendaharaan.

Kegiatan *benchmarking* ini menandai langkah strategis DJPb dalam mengadopsi *best practices industry-leading* untuk mempercepat *digital transformation initiatives*. Kolaborasi dengan Telkom Corporate University memberikan *technical insights* sekaligus memperkuat *network* yang akan mendukung *sustainability* program transformasi, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas *Change Management and Communication strategies* DJPb dalam mendukung modernisasi sistem perbendaharaan nasional.

2. BENCHMARKING CMC KAI

Dalam rangka akselerasi *Treasury Modernization* dan

perluasan layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan telah melaksanakan kegiatan *Benchmarking Change Management and Communication* (CMC) Seri 1 (*Business Process Transformation and Communication Strategy*) ke PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari proses bisnis strategi komunikasi, serta mendapatkan ide dan solusi baru yang dapat dikembangkan dalam proses bisnis Strategi *Change Management and Communication* PMO DJPb.

Kegiatan *benchmarking* dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2024 di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. Adapun kegiatan dibuka oleh *Manager of Corporate Culture* PT KAI, Bapak Dhesca Prakoso Setiawan, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi DJPb, Bapak Bonny Adam. Sesi paparan materi dan diskusi dalam kegiatan *benchmarking* ini bertema "*Business Process Transformation and Communication Strategy*" dan disampaikan oleh tiga narasumber dari PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dhesca Prakoso Setiawan, selaku *Manager of Corporate Culture*, membahas "*Culture & People Transformation*" mencakup KAI *Trainsformation Journey*, *Culture Transformation*, KAI *Culture Strategy* 2020-2024, *Culture Roadmap* 2025-2029, *Leadership System*, *Culture Agent*, *Business & Operational Practices*, dan *Business Process Modelling* PT KAI. Beliau juga menyoroti *Human Capital Roadmap* 2020-2024 dan *Human Capital Information System*. Selanjutnya Rahadinie, *Manager of Passenger Regulation and Tariff*, memaparkan "Transformasi Pelayanan Pelanggan," yang



meliputi *Product Innovation*, peningkatan produk dan layanan berdasarkan umpan balik dan tren pasar, *Customer Handling*, Kolaborasi Layanan, *Ticket Evolution*, *Access by KAI*, dan menciptakan ekosistem.

Narasumber ketiga, Adi Cakra Wiguna, Spesialis Desain Organisasi PT KAI, menjelaskan "Transformasi Struktur Organisasi PT Kereta Api (Persero)". Materi yang dibahasnya mencakup Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan, Struktur Organisasi Kantor Pusat & Struktur Organisasi Area, *Human Capital*, dampak Covid-19 terhadap KAI, serta *Organization Development*. Beliau juga menguraikan penyesuaian struktur dan tata kelola

organisasi yang dipengaruhi oleh strategi, sistem, sumber daya manusia, dan budaya, serta bagaimana transformasi organisasi dilakukan untuk mengatasi penurunan pendapatan akibat Covid-19.

Beberapa hal penting yang dapat diambil dari kegiatan *benchmarking* ini adalah bahwa PT KAI telah berhasil menerapkan praktik-praktik efektif dalam manajemen perubahan, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif manajer senior dan pelaksanaan pelatihan intensif bagi pegawainya. Selain itu, komunikasi internal PT KAI juga menunjukkan upaya yang terstruktur dalam menyampaikan informasi perubahan, meskipun masih terdapat potensi peningkatan dalam hal konsistensi dan frekuensi. Dalam proses transformasinya, PT KAI telah mengadopsi metode berbasis data untuk memantau dampak perubahan, memanfaatkan teknologi untuk komunikasi yang lebih efektif, dan mengintegrasikan umpan balik dari pegawai ke dalam proses perubahan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan *benchmarking* ini, akan dilakukan penyusunan strategi komunikasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan piloting pembayaran belanja listrik dan telekomunikasi melalui Platform Pembayaran Pemerintah, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas *Change Management and Communication* PMO DJPb secara umum.





KOMUNIKASI

1. KEGIATAN EDUKASI DIGITAL

Dalam rangka mendukung Transformasi Kelembagaan DJPb, PMO DJPb memiliki beberapa program edukasi digital yang dipublikasikan melalui Instagram, Facebook, dan Kemenkeu *Sharepoint*. Program edukasi digital diwujudkan dalam:

a. Agenda Transformasi (GENTA)

GENTA merupakan salah satu inovasi manajemen perubahan dan komunikasi dalam menyampaikan informasi capaian Inisiatif Strategis dan *Quickwins* DJPb dalam bentuk poster atau infografis. GENTA bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pada insan perbendaharaan mengenai transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung dalam lingkup DJPb.

Penyampaian GENTA disampaikan secara formal melalui Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Tim PMO DJPb kepada seluruh unit di lingkup DJPb dan secara non formal melalui media sosial PMO DJPb pada Instagram dan Facebook. Pada tahun 2024, PMO telah menyampaikan secara periodik GENTA pada kanal-kanal tersebut.

Adapun beberapa poin yang disajikan dalam GENTA antara lain:

- 1) Capaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dimana DJPb menjadi *Initiative Owner* pada bulan berkenaan disajikan dalam grafik dan penjelasannya.
- 2) Capaian *Quickwins* DJPb pada bulan berkenaan disajikan dalam grafik dan penjelasannya.

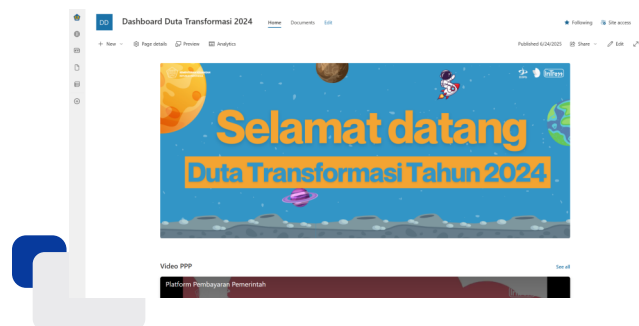
- 3) Agenda Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan dimana DJPb menjadi *Initiative Owner* pada bulan selanjutnya.
- 4) Kutipan kata-kata dari Menteri Keuangan berkaitan dengan Transformasi Kelembagaan.

b. Dashboard Duta Transformasi



Pada tahun 2024, PMO DJPb menginisiasi sebuah *Landing Page* yang memuat informasi mengenai Duta Transformasi. *Dashboard* ini berbasis *Sharepoint* Kemenkeu dan bersifat eksklusif dimana hanya dapat diakses melalui akun Kementerian Keuangan. Dengan adanya dashboard ini, informasi mengenai Duta Transformasi DJPb 2024 dapat diakses secara terpusat sehingga mempermudah akses informasi. Pada *Dashboard* ini, terdapat beberapa informasi yang dapat diakses Duta Transformasi DJPb antara lain:

- 1) Informasi umum mengenai Duta Transformasi, seperti KMK penetapan duta, program kerja (proker) duta, dan kertas kerja realisasi proker duta
- 2) Video Edukasi Platform Pembayaran Pemerintah
- 3) Informasi kegiatan Duta, seperti Intimacy Duta Transformasi, Class of Duta, dan Trustformation 2024
- 4) Informasi mengenai fasilitator Duta Transformasi



c. Tanggal-tanggal Penting Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)

Sebagai bentuk perwujudan dukungan *Change Management and Communication* pada PPP, PMO DJPb juga melakukan publikasi terkait Tanggal-Tanggal Penting PPP. Tanggal-tanggal Penting ini dipublikasikan setiap bulannya pada media sosial Instagram dan Facebook. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan satuan kerja *piloting* PPP dapat memahami tanggal-tanggal transaksi melalui PPP pada setiap bulannya guna mendukung adanya pembayaran terjadwal. Adapun ruang lingkup transaksi melalui PPP yang dipublikasikan adalah:

- 1) Transaksi *Common Expenses* (Listrik dan Telekomunikasi)
- 2) Transaksi Tunjangan Kinerja
- 3) Transaksi Uang Makan
- 4) Transaksi Uang Lembur





2. PODCAST

a. Podcast on Location (POL-POLAN)

Pol-Polan atau *Podcast on Location* merupakan salah satu inovasi manajemen perubahan dan komunikasi dalam penyampaian *podcast* seputar capaian *Quickwins* dan hal-hal yang menginspirasi bertempat di lokasi *resource person* berada. Tujuan dari *podcast* ini adalah menjadi sarana diskusi dengan para *stakeholders*.



b. Intress-think

Dalam mendukung Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, PMO DJPb berkolaborasi dengan Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler (KLIP) menyelenggarakan Podcast Intress-think. Podcast ini disiarkan secara langsung (*live streaming*) pada kanal Youtube Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Adapun materi yang disampaikan dalam *podcast* ini adalah isu-isu terkini yang berada di masing-masing Direktorat.

3. SOSIALISASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

a. Pelaksanaan Sosialisasi TK pada 4 (empat) Wilayah

No	Tanggal	Lokasi
1.	12 s.d. 14 Juni 2024	Bandung
2.	19 s.d. 21 Juni 2024	Mataram
3.	24 s.d. 26 Juni 2024	Medan
4.	22 s.d. 24 Juli 2024	Manado

Pada bulan Juni 2024, PMO DJPb menyelenggarakan Sosialisasi Transformasi Kelembagaan pada 4 (empat) wilayah berdasarkan Surat Tugas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ST-180/PB.7/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Surat Tugas Kegiatan Tindak Lanjut atas Permasalahan Pembayaran *Common Expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah dan ST-215/PB.7/2024 tanggal 8 Juli 2024 perihal Kegiatan Tindak Lanjut atas Permasalahan Pembayaran *Common Expenses* melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan *awareness* pada pegawai DJPb mengenai Transformasi Kelembagaan yang sedang berlangsung pada organisasi. Materi Sosialisasi TK yang disampaikan adalah capaian Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan di mana DJPb menjadi *Initiative Owner* dan juga *Quickwins* DJPb hingga

periode Mei 2024. Dalam kesempatan ini, masing-masing tim PMO DJPb juga menyampaikan strategi komunikasi PMO DJPb dalam mendukung Tranformasi Kelembagaan, seperti OSI, GENTA, Podcast, dan *Annual Report*.





b. Pelaksanaan Sosialisasi TK pada kegiatan *Training of Trainers (ToT) CSO Kantor Vertikal lingkup DJPb*

PMO DJPb juga melakukan sosialisasi Transformasi Kelembagaan pada kegiatan ToT CSO Kantor Vertikal lingkup DJPb pada 1 s.d 2 September 2024 di Jakarta.



PMO DJPb, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit TK, Kasi Transformasi Sistem Pembayaran dan Penerimaan, dan Kasi Transformasi Pengelolaan Likuiditas, menyampaikan materi terkait dengan Digitalisasi Sistem Keuangan Negara yang terdiri dari:

- 1) *Single Billing* Penerimaan Negara
- 2) Govmart
- 3) *Payment Gateway*
- 4) E-Perjadin
- 5) PPP Belanja Pegawai
- 6) SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)



4. TRUSTFORMATION

Merupakan strategi komunikasi berkelanjutan atas proses transformasi kelembagaan yang saat ini dilakukan oleh DJPb khususnya PMO DJPb, sehingga proses internalisasi transformasi kelembagaan dapat berlangsung dengan baik dan sekaligus memberikan energi dan semangat baru bagi pemilik inisiatif strategis untuk mencapai target transformasi kelembagaan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, *Trustformation* mengusung tema “*Transforming Towards Excellence*”. Kegiatan ini diselenggarakan secara *hybrid* di Ruang Rapat Sinergi Lantai 3 Direktorat Sistem Perbendaharaan serta *Microsoft Teams*.

Dalam kesempatan ini, Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua Tim PMO DJPb menyampaikan *keynote speech* sekaligus membuka kegiatan *Trustformation*. Beliau menyampaikan gambaran mengenai transformasi kelembagaan yang sudah, sedang, dan akan dikerjakan, serta ucapan terima kasih kepada *Unit in Charge* (UIC) dan Duta Transformasi dalam ikut menyukseskan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di DJPb. Direktur Sistem Perbendaharaan juga berpesan agar para Duta selalu berupaya untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan serta mengharapkan para Duta dapat menyelesaikan Laporan Proyek Perubahannya tepat waktu dan menghasilkan laporan yang berkualitas dan berdampak.

Pada *Trustformation* tahun 2024, juga dilakukan *launching* logo Platform Pembayaran Pemerintah dan *Virtual Booth* Transformasi Kelembagaan oleh Direktur Sistem Perbendaharaan. Selanjutnya, dilakukan sesi pemaparan materi. Narasumber pada acara ini adalah

UIC dari masing-masing *Quickwins* 2024. Latar belakang *Quickwins*, pencapaian *Quickwins* hingga bulan Desember 2024, dan kebermanfaatannya menjadi poin materi yang disampaikan.



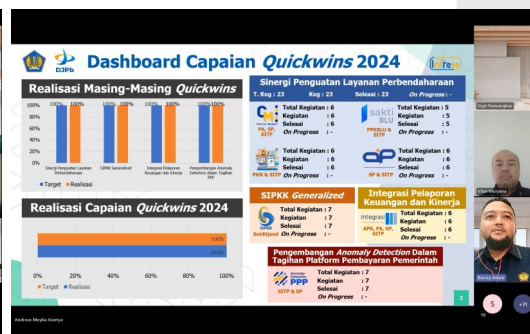
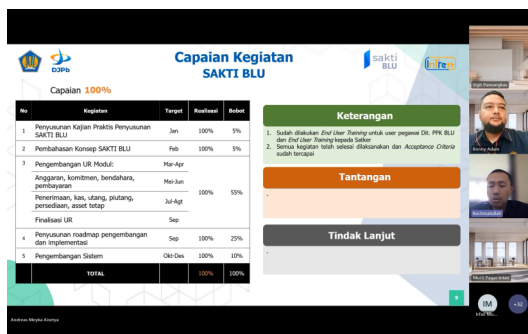


MONITORING DAN EVALUASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

1. ONE ON ONE QUICKWINS DJPB

One on one meeting rutin dilaksanakan oleh PMO DJPb untuk mengawal capaian *Quickwins* masing-masing UIC (*Unit in Charge*) pada Direktorat/Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Quickwins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai, yang dijalankan dalam waktu satu tahun. Pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) *Quickwins* yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kegiatan *one on one* dengan masing-masing UIC dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan *one on one meeting* sebanyak 12 (dua belas) kali, yang dimulai sejak bulan Januari hingga Desember 2024. Pembahasan rutin yang dilakukan adalah *update* perkembangan capaian *Quickwins*, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai *Quickwins*, tindak lanjut yang akan dilaksanakan, serta *update* capaian kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

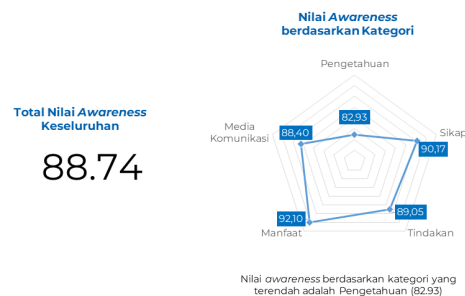


2. SURVEI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

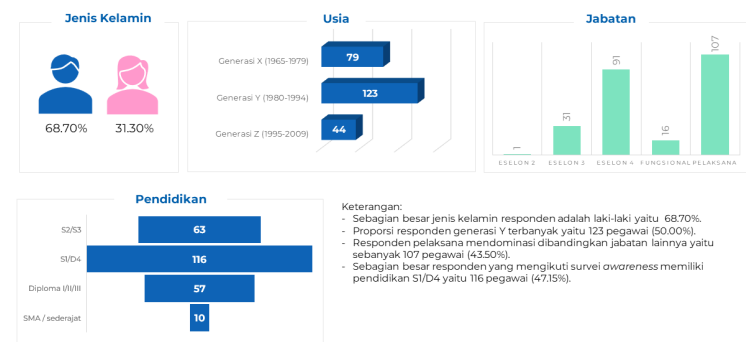
Keberhasilan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan ditentukan salah satunya adalah *awareness*/pemahaman pegawai terhadap program baru yang sedang berjalan. *Awareness* menjadi dasar bagi pegawai untuk beradaptasi atas setiap perubahan di Institusi. Melalui survei *awareness* pegawai, diharapkan akan didapatkan pemetaan tingkat *awareness* para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan Transformasi Kelembagaan. Kegiatan survei *awareness* telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni s.d. 26 Juli 2024 sesuai dengan Surat Tugas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ST-180/PB.7/2024 tanggal 11 Juni 2024 dan ST-215/PB.7/2024 tanggal 8 Juli 2024.

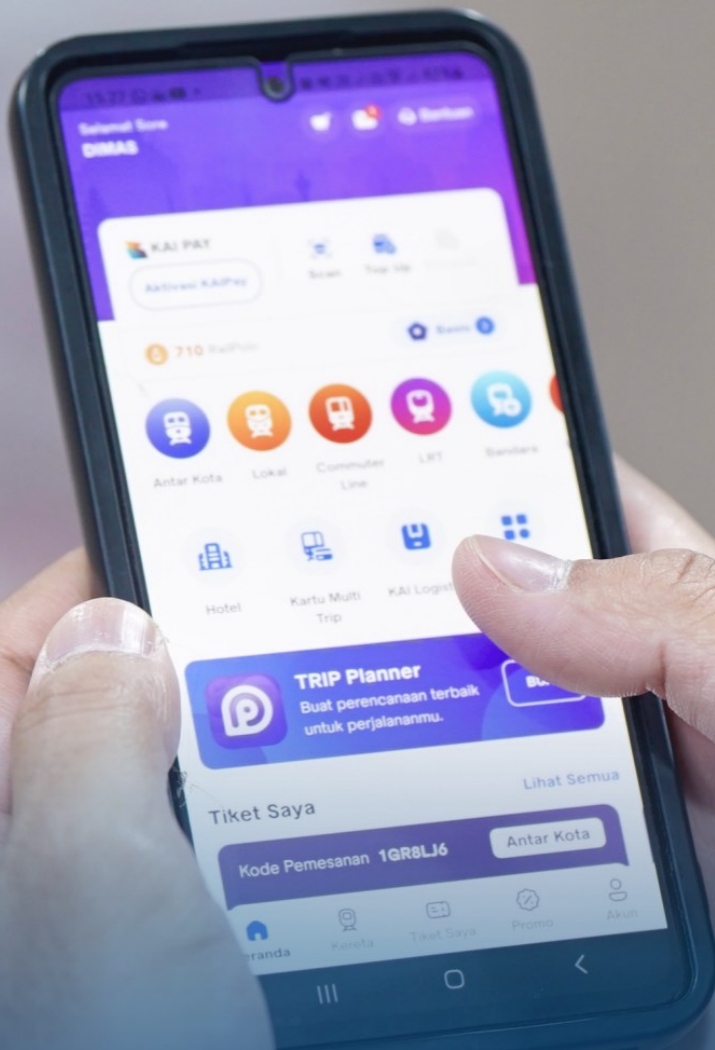
Dari sebanyak 5 lokasi yang dijadikan sampel survei total responden adalah sebanyak 246 orang yang terdiri dari para Pejabat/pegawai di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun KPPN. Nilai *awareness* tahun 2024 sebesar 88,74 (skala 1-100) yaitu sangat tinggi artinya *awareness* pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan Transformasi Kelembagaan berada dalam kategori sangat baik.

Nilai Awareness



Karakteristik Responden





01

**Access Anytime,
Anywhere**



02

**Simplifying
the Process**



03

Modernization in Motion



04

Seamless Connectivity

DAFTAR AKRONIM

A

ABID	<i>Automatic Business Intelligence Dashboard</i>
ADK	<i>Arsip Data Komputer</i>
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
APBN	<i>Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
ASN	<i>Aparatur Sipil Negara</i>

B

BA	<i>Bagian Anggaran</i>
BIOS	<i>BLU Integrated Online System</i>
BLU	<i>Badan Layanan Umum</i>
BLU DMS	<i>BLU Decision Making Support System</i>
BLUD	<i>Badan Layanan Umum Daerah</i>
BMN	<i>Barang Milik Negara</i>
BP	<i>Bendahara Pengeluaran</i>
BPK	<i>Badan Pemeriksa Keuangan</i>
BPP	<i>Bendahara Pengeluaran Pembantu</i>
BPP	<i>Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua</i>
BUMN	<i>Badan Usaha Milik Negara</i>
BUP	<i>Batas Usia Pensiun</i>

C

CA	<i>Collecting Agent</i>
CMC	<i>Change Management and Communication</i>
CoA	<i>Chart of Accounts</i>
COD	<i>Class of Duta</i>
COTS	<i>Commercial Off-The-Shelf</i>
CPIN	<i>Cash Planning Information Network</i>
CSO	<i>Customer Service Officer</i>
CTO	<i>Central Transformation Office</i>

D

<i>Dashboard ORGANISE</i>	<i>Organization and Governance Integrated System</i>
DIPA	<i>Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran</i>
DJPb	<i>Direktorat Jenderal Perbendaharaan</i>
DPR	<i>Dewan Perwakilan Rakyat</i>

E

E-BG	<i>Electronic Bank Guarantee</i>
EBS	<i>Oracle E-Business Suite</i>
EKA	<i>Evaluasi Kinerja Anggaran</i>
eSKPP	<i>Sistem Elektronik Surat Keterangan Penghentian Pembayaran</i>
EWS	<i>Early Warning System</i>

F

FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKPKN	<i>Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara</i>
FO	<i>Front Office</i>
FRSW	<i>Financial Reporting Single Window</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>

G

GENTA	<i>Agenda Transformasi</i>
GFS	<i>Government Finance Statistic</i>
GLP	<i>Modul General Ledger dan Pelaporan</i>
GUP	<i>Ganti Uang Persediaan</i>

H

HRIS	<i>Human Resource Information System</i>
------	--

I

ID	Identitas, Identifikasi
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IS	Inisiatif Strategis
ITDRI	Indonesia <i>Telecommunication & Digital Research Institute</i>

J

JHT	Jaminan Hari Tua
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	Jaminan Kematian

K

K/L	Kementerian/Lembaga
KKP	Kartu Kredit Pemerintah
KLIP	Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokol
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

L

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

M

MO	<i>Middle Office</i>
MOFIN	<i>Ministry of Finance Organizational Fitness Index</i>
MONSAKTI	Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
MP PNB	Maksimum Pencairan PNB
MPN	Modul Penerimaan Negara

N

NADIA	<i>New Architecture Design for Investment Administration</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak

O

OBTI	Organisasi, Tata Kelola, dan Teknologi Informasi
OMSPAN	<i>Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara</i>
OSI	<i>One Stop Information</i>

P

P3DN	Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
PC-PEN	Penanganan Covid-19 - Pemulihan Ekonomi Nasional
PDN	Produk Dalam Negeri
Pemda	Pemerintah Daerah
PG	<i>Payment Gateway</i>
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PK BLU	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMO	<i>Project Management Office</i>
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
POL-POLAN	<i>Podcast On Location</i>
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPP	<i>Platform</i> Pembayaran Pemerintah
PPSPM	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
PSN	Proyek Strategis Nasional
PT Asabri	Perseroan Terbatas Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

PT KAI Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia
PT PLN Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara
PT Telkom Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia
PUSINTEK Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

R

RBA Rencana Bisnis Anggaran
RCE *Regional Chief Economist*
Renstra Rencana Strategis
RI Republik Indonesia
RKA Rencana Kerja dan Anggaran
RKAKL Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
 Negara/Lembaga
RO Rincian Output
RPA *Robotic Process Automation*
RPA Bot Robot RPA
RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Nasional
RVRO Realisasi *Volume Rincian Output*

S

SAKTI Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Satker PPP Satuan Kerja Pengelolaan, Pengembangan,
BUN dan Pengawasan Bendahara Umum Negara
SBM Standar Biaya Masukan
SDM Sumber Daya Manusia
SIKRI Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia
 Sistem Informasi Pengelolaan dan Kinerja
SIPKK Keuangan
 Sistem Informasi Kepesertaan Jamkestama dan
SIPRIMA Jamkesmen
SIT *System Integration Testing*
SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
SOA *Service-Oriented Architecture*
SP2D Surat Perintah Pencairan Dana

SPAN Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPD *Scheduled Payment Date*
SPM Surat Perintah Membayar
SPP Surat Permintaan Pembayaran
SRS *Software Requirements Specification*

T

TBD *Treasury Big Data*
THR Tunjangan Hari Raya
TK Transformasi Kelembagaan
TKD Transfer Ke Daerah
TKDD Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKDN Tingkat Komponen Dalam Negeri
TMT Terhitung Mulai Tanggal
TOOS Taspen *One Hour Online Service*
TTE Tanda Tangan Elektronik

U

UAT *User Acceptance Test*
UE-1 Unit Eselon I
UIC *Unit In Charge*
UMi Ultra Mikro
UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UP Uang Persediaan
UR *User Requirement*

W

WB Wajib Bayar
WBS *Work Breakdown Structure*
WP Wajib Pajak
WS Wajib Setor
WTP Wajar Tanpa Pengecualian

TIM PENYUSUN

Pengarah

Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Ketua PMO DJPb, Sulaimansyah

Penanggung Jawab

Kepala Subdirektorat Transformasi Kelembagaan selaku Pelaksana Harian Ketua PMO DJPb, Maryono

Koordinator

Kepala Seksi Transformasi Sistem Pembayaran dan Penerimaan, Muhammad Nur
Kepala Seksi Transformasi Akuntansi, Pelaporan dan Misi Khusus, Samsul Anam
Kepala Seksi Transformasi Pengelolaan Likuiditas, Khiyarunnas
Kepala Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi, Bonny Adam

Redaksi

Elenyora Tsabita, Julianda Rosyadi, Radityo Agung Raharjanto, Agustina Diprianti, Omega Carladiva
Murbarani, Miftah Muhammad Wazni, Firmansyah Wahyu Pratama, Sigit Pamungkas, Afina Razan, Rizka
Rahma Wijayanti, Andreas Meyka Aisetya, Mariana Sicilia

Desain Grafis

Alib Hari Pratomo, Martina Eka Hardyanti, Andika Prameswari Candra Kusumawardani, Aditya Dimas S

Kontributor Foto

Siti Azalia Filbert

Kontak PMO

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III A, Lantai 4
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta
Email: pmodjpb@kemenkeu.go.id, pmodjpb@gmail.com

PASTI LEBIH BAIK

*Elevating Digital Treasury:
Driving the Transformation Forward*

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIA Lantai 4
Jl. Budi Utomo Nomor 6 Jakarta
Telp : (021) 3849670, 3449230
Fax : (021) 3849670